



**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI X DPR RI DENGAN DEWAN PENGURUS NASIONAL
PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN GURU (P2G), FORUM GURU
PRIORITAS PERTAMA KCD XII KOTA TASIKMALAYA DAN KABUPATEN
TASIKMALAYA, FORUM GURU HONORER LULUS PASSING GRADE
SELURUH INDONESIA (FGHNLPSI) PPPK GURU 2021, DEWAN
PENGURUS PUSAT ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INDONESIA (AGPAII), DAN GURU HONORER NEGERI 10+ (GHN 10+)
LAMPUNG UTARA**

- Nama Rapat : RDPU Komisi X DPR RI dengan Forum Guru
- Tahun Sidang : 2023 – 2024
- Masa Persidangan : V (Lima)
- Rapat ke- : -
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal Waktu : Kamis, 4 Juli 2024
13.45 s.d. 16.41 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
- Ketua Rapat : Ferdiansyah, S.E., M.M./F-PG
- Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., MH/Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI
- Acara : 1. Guru Honorer terdampak Penempatan Guru P3K Guru Honorer P1
2. Guru Lulus Passing Grade yang belum mendapatkan Formasi
3. Lain-lain
- Hadir : **PIMPINAN :**
1. Dr. Dede Yusuf M E., S.T., M.I.Pol.
- ANGGOTA :**
- F-PDI PERJUANGAN :**
1. Rano Karno, S.IP.
2. Dr. Hj. Rosiyati MH Thamrin, S.E., M.M., M.H.
- F-P.GOLKAR :**
1. Ferdiansyah, S.E., M.M.
2. H. Muhammad Nur Purnamasidi
3. Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si.

F-P.GERINDRA:

1. -

F-P.NASDEM :

1. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.MTr.

F-PKB :

1. -

F-P.DEMOKRAT :

1. Bramantyo Suwondo M., M.IR.

F-PKS :

1. -

F-PAN :

1. Prof. Dr. Zainuddin Maliki., M.Si.

F-PPP :

1. -

UNDANGAN :

1. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G (Iman Zanatul Haeri, S.Pd.)
2. Ketua P2G GARUT (Rida Rodiana, S.Pd.)
3. Forum Guru Prioritas Pertama KCD XII (Opa Hidaul Wada, S.P.)
4. Forum Guru Prioritas Pertama KCD XII (Sudarmono, S.Pd.)
5. Ketua FGHNLPSP PPPK Guru 2021 (Heti Kustrianingsih, S.T.)
6. Koordinator Kabupaten Sleman FGHNLPSP PPPK Guru 2021 (Fajar Aris, S.Pd.)
7. Koordinator Kabupaten Tulungagung FGHNLPSP PPPK Guru 2021 (Lilis Maesaroh, S.Pd.)
8. Sekretaris Dewan Pembina AGPAIL (Dr. Daruri, S.Ag., M.Pd.I.)
9. Ketua AGPAIL (Drs.H. Endang Zenal, M.Ag.)
10. Sekretaris Jenderal AGPAIL: (Ahmad Budiman, S.Ag., M.Pd.)
11. Ketua GHN 10+ Lampung Utara, (Hera Yunita Sari, S.Pd.)

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIMULAI PADA PUKUL 13:45 WIB)

(REKAMAN TERPUTUS)

KETUA AGPAII (Drs.H. ENDANG ZENAL, M.Ag.):

Kami sampaikan lagi, masih ada beberapa kota kabupaten yang masih minim atau bahkan nol, kuotanya. Tapi, Mas Nadiem sudah menjanjikan walaupun pemda tidak memberi kuota, kementerian akan langsung memberi kuotanya.

Terima kasih sekali lagi, untuk P3K.

Kemudian, yang perlu kami sampaikan sekarang di sini adalah tentang guru honor. Yang pertama, guru honor terdampak. Kemarin, pengangkatan P3K yang notabene kemarin itu P3K yang diangkat rata-rata dari guru sekolah swasta. Dari sekolah swasta, lalu diangkat di negeri diangkat di negeri, otomatis guru-guru honor yang ada di negeri itu kehabisan jam. Tetapi, *Alhamdulillah* kalau untuk Jawa Barat, saya *nggak* tahu kalau di luar Jawa Barat, untuk Jawa Barat ada kebijakan kemarin, Pak Haji, yaitu “mohon semua kepala sekolah menerima semua P3K yang datang ke sekolah apapun kondisinya”.

Yang kedua, tidak boleh mengeluarkan guru honor. Berapa jam pun dia punya, pertahankan di sana. Itu terima kasih, kami menyambut gembira kebijakan itu. Akan tetapi, kalau ini tidak dilanjutkan dengan perjuangan berikutnya, tetap akan jadi masalah. Untuk itu di forum ini, kami mengusulkan bahwa guru-guru honor yang terdampak oleh P3K kemarin, mohon segera diangkat menjadi P3K ya, untuk kesempatan berikutnya. Sehingga, nanti seimbang, yang datang baru juga nanti nyaman, yang sudah lama pun nyaman, begitu. Supaya guru-guru tadi, urusan gaji apa-apa, saya tidak bicara di sini. Yang penting nasibnya dulu. Kesejahteraan mereka dengan nasibnya diangkat P3K, supaya tidak terusir oleh guru yang baru, satu itu.

Yang kedua, di guru agama. Pak Haji mohon maaf, ini guru agama Islam ataupun non muslim, kita punya dua *dundungan*, dua dua kementerian, *nah* dua juragan, Kementerian Agama dan Kemendikbud, itu. Kemudian faktanya pun, perlu kami sampaikan di sini, yang dari yang dulu ya temen saya, saya angkatan Kemendikbud dulu, itu ada 11.000-an lebih. Kemudian yang Kemenang, sama dulu, kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi, itu 9.000-an, yang oleh pemda 117.000 lebih, kemudian yang yayasan di swasta masih ada 41.000, kemudian yang honor di negeri itu ada 4, 68.000 lebih. Yang inilah yang menjadi apa ya? Terdampak kemarin. 68.000 lebih apa? Honor PAI di negeri kemarin itu sudah hampir-hampiran frustrasi, karena kedatangan guru P3K yang dari swasta.

Contoh kasus, SMK Negeri 3 Tasikmalaya, kebetulan saya pimpinannya. Saya kedatangan 10 orang P3K dari swasta, *nah* dan ternyata itu tidak klop dengan DSO kita. Guru agama datang dua orang, sementara kami masih punya honor dua orang. *Nah*, yang dua orang ini hampir-hampiran terusir, tapi karena ada instruksi, saya pertahankan. *Nah*, mudah-mudahan sesegera mungkin mereka bisa terangkat.

Nah, kemudian karena kita punya dua itu, dua “bos”, jadi permasalahannya itu lebih rumit. Pertama, yang 9.000 itu gajinya di Kemenag, sementara yang lainnya dari Kemendikbud. Kenaikan pangkatnya pun di Kemendikbud, yang 9.000 di Kemenag. *Nah*, itu *nggak* ada masalah, walaupun ada kecemburuan nanti. Yang 9.000 dia tidak bisa punya karir sebagai kepala sekolah, sebab dia Kemenag NIP nya, tidak diurus oleh Kemendikbud. Sementara, dia hidup di Kemendikbud.

Kemudian, yang NIP 15 ya, mohon maaf, yang NIP 13 kemarin yang dari Kemendikbud, gajinya di Kemendikbud tapi sertifikasinya di Kemenag. Ini yang terus terang, kami dari asosiasi belum menemukan regulasi mana yang dipake, sehingga guru agama yang guru di Dikbud, itu di sertifika apa? Sertifikasi dibawa oleh Kemenag. Yang kami pelajari, itu hanya ada di PP 55, ada satu ayat dalam suatu pasal, bahwa “pembinaan GPAI oleh Kementerian Agama”. Kalimatnya “pembinaan” bukan “rekrutmen”. Tapi di PMA, beberapa PMA memaknai itu sampai rekrutmen. Dan faktanya sekarang, Kemenag tidak bisa merekrut guru agama, karena sudah diotonomi daerahkan dan itu sudah sebuah fakta. Jadi, seharusnya, kalau menurut kami, yang gajinya di Kemendikbud, sertifikasinya pun di Kemendikbud. Itu yang yang kami pikir. Tapi, *monggolah*, silakan bagaimana kalimatnya dari dari Komisi X nanti.

Nah, permasalahannya apa? Sebetulnya sih pada awalnya, siapapun yang mau bayar kami, kan sama negara, *nggak* ada masalah. Itu sebenarnya. Tetapi, permasalahan sekarang, mohon maaf ini fakta yang harus saya sampaikan, bahwa guru agama itu untuk dapat PPG saja, kami harus mengemis-ngemis ke Pemda, Pak. Jadi, dari Kementerian tidak ada anggaran untuk mem-PPG-kan, walaupun sudah lulus *pre-test*, harusnya PPG. Yang tahun ini saja, nol. Waktu kemarin waktu Covid, nol. Padahal, Kemendikbud tetap ada PPG, di kemen di Kemenag tidak ada. Kami, *alhamdulillah* ada surat dari Dirjen supaya pemda bisa membantu. Maka, kami asosiasi, ada yang mandiri kami sendiri, ada yang dibantu juga oleh Kemenag, baik provinsi maupun kota datang ke dewan. Dan *alhamdulillah* sampai hari ini sudah banyak beberapa pemda kabupaten kota dan provinsi yang membantu kami.

Kalau kami cari, *nggak* ada satu Mapel pun yang untuk PPG. Dia nyari-nyari biaya ke mana-mana, sementara kami ke pemda. Tapi ada bagusnya, kami bersilaturahmi, bersilaturahmi kenal dengan anggota dewan Pak Ferdi. Kalau Pak Ferdi kan luar biasalah, beliau sendiri yang memang baik seperti itu.

Nah, untuk PPG guru agama, kami yang ke sana. Bahkan, sekarang kami sedang menjalin hubungan baik dengan Baznas supaya ada bantuan untuk biaya PPG. Lagi-lagi ini mohon maaf, kemarin saya sampai hampir

marah, sekarang itu ada Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2024 yang di klausulnya itu ada 1 ayat mengatakan “untuk pembiayaan PPG, tidak harus oleh kementerian, tidak oleh pemda, oleh yayasan, tapi mandiri bisa”. Nah, kami guru agama, semangat. Pak Haji, kalau memang ada klausulnya boleh mandiri, kami siap mandiri.

Nah, saya sampaikan ke direktorat: “Kang ini ada Permen baru, bagaimana tanggapan Akang?”. Nah, itu katanya “saya kurang cek itu urusan negara orang lain, kita Kemenag”. Bayangkan Pak. Padahal, itu logonya logo Garuda, berarti di Indonesia, kan? Guru agama ini guru Indonesia, gitu. Sampe ada istilah begitu. Artinya, “ya itu kan kebijakan di Kemendikbud, kita kan Kemenag”. Saya bilang, “saya orang Kemendikbud, sehari-hari saya di sekolah, masa”.

Makanya saya sampai bilang ke teman-teman, “mari kita datang ke Komisi X, judulnya “Setop diskriminasi untuk GPAI”. Kalau ini masih terjadi, terjadi diskriminasi yang besar-besar untuk GPAI yang jumlahnya masih ratusan ribu. Dari 248.000 jumlah guru agama se-Indonesia, baru setengahnya yang PPG, Pak. Padahal, tanggung jawab negara sebetulnya bagaimana guru itu semuanya profesional, yang indikator profesional itu adalah dengan sudah punya sertifikat sertifikasi, ya. Jadi, sebetulnya urusan dibayarnya urusan lain, tapi mendapat sertifikat bahwa guru itu profesional, itu yang lebih penting kami arahkan, kami perjuangkan.

Nah kemudian, lagi-lagi masalah guru PPG, masalah PPG ini kami mohon sekali, memang. Bahkan, mohon maaf, ini Pak Dirjen GTK (Pak Haji) sampai bilang begini di depan Pak Rektur, kami dipertemukan, asosiasi dengan Direktorat, komplis tuh, “kalau memang PAI tidak terurus, serahkan kepada kami, kami urus”, itu dari GTK. Karena, kami memang di sekolah, gitu. Jadi, jangan sampai sekarang masih terjadi guru nonPAI baru 2-3 tahun sudah sertifikasi, sudah PPG. Sementara, kami sudah puluhan tahun masih belum, ya.

Bahkan, ini mohon maaf juga, karena kami juga di di sekolah, saya kepala sekolah menerima beberapa guru nonPAI yang PPG pra jabatan. Jadi, sebelum masuk jadi guru, sudah di PPG-kan. Itu luar biasa di Kemendikbud. Sementara kami, jangankan yang pra jabatan, yang dalam jabatannya pun masih terseok-seok. Kami *nggak* tahu tahun berapa akan terselesaikannya.

Jadi, mohon lewat forum ini, setop diskriminasi terhadap GPAI. Karena kami ada di sekolah, mohon bantuan Kemendikbud. Apapun bentuk kebijakannya, *monggo* Komisi X yang lebih tahu, yang penting kami jangan seperti ini, sampai seolah-olah mencari ke sana, mencari ke sini. Bahkan, beberapa kota kabupaten sudah siap uang mandiri, tapi tadi, itu kan Kemendikbud yang boleh, di kami *nggak* boleh. Ada yang paling pahit lagi, Pak Haji, ini apa ya? Mohon maaf saya sampaikan ini agak auroh sebetulnya, tapi ya perlu kami sampaikan, apa? Kalimat yang terakhir kemarin: “Pak Nandang ke AGPAII, di kami ini sebetulnya permasalahannya bukan hanya untuk mem-PPG-kan guru agama, uangnya *nggak* ada. Tapi, walaupun semua PPG, kami tidak punya anggaran untuk bayar sertifikasinya”.

Pak, malam itu saya hampir nangis dengar itu. Kami kira negara itu tidak mampu hanya untuk PPG, makanya kami berjuang ke Baznas, ke pemda, ke perorangan guru-guru, siap semuanya. Terutama, di Jawa Barat yang saya tahu. Tapi ternyata, "jangan kalau semua di PPG-kan, harus dibayar tahun berikutnya, kami belum punya anggaran untuk itu". Yang itu tidak pernah terdengar di Kemendikbud, di teman-teman guru yang nonPAI.

Oleh karena itu, berkali-kali kami bersurat ke Komisi VIII juga belum pernah ada respon, malah Komisi X yang cepat merespon, karena mungkin ada Pak Ferdiansyah yang saya selalu curhat, ya. Beliau itu tidak harus di forum ini, pribadi pun saya sering curhat. Jadi, terima kasih sekali lagi dan mohon sekali lagi, mohon guru agama di Indonesia ini sudah tidak ada waktu, bukan waktunya lagi untuk mendapatkan diskriminasi.

Pak Sekjen, ada menambahkan?

Oke silakan.

SEKRETARIS JENDERAL AGPAII: (AHMAD BUDIMAN, S.Ag., M.Pd.):

Sedikit saja mungkin, Pak pimpinan.

Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum kami, "stop diskriminasi". Dan hampir semua segmen masalah dalam guru agama itu, hampir bermasalah.

Yang pertama adalah di pembinaan bermasalah, di karir bermasalah, di kesejahteraan bermasalah, di rekrutmen juga bermasalah. Jadi, mohon sesegera mungkin penderitaan guru Pendidikan Agama Islam ini dihentikan.

Banyak teman-teman yang menjelang pensiun tapi mereka tidak mendapatkan PPG, dan di mana negara hadirnya. "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dan sekali lagi, bahwa PPG itu kalau di kendaraan adalah SIM, orang disuruh mengemudi mobil tapi tidak dikasih SIM. Ini disuruh mengajar tapi tidak dikasih sertifikat dan itu bertahun-tahun. *Nah* oleh sebab itu, sekali lagi, dalam forum yang luar biasa ini, kami memohon sekali lagi "stop diskriminasi untuk Guru Pendidikan Agama Islam".

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya. Terima kasih.

Dari Perwakilan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Dan tadi sudah kita catat semuanya, ya. Thea tolong dicatat semuanya dan nanti ada tertulis.

Baik dari, dan hadir sini sekalian komplit ini. Pak Endang Zainal ya, hadir ya? Pak Daruri? Hadir, Pak Ahmad Budiman? Hadir, Bapak Agus Setiawan?

Hadir, Ibu Susan Daniati? Hadir, Bapak Muhammad Rifai DPP AGPAII? Ada. Lengkap.

Terima kasih.

Jadi, sangat serius kehadirannya dan tepat waktu. Kami lanjut kepada yang hadir yang kedua dari forum guru apa nih?

KEPALA BIDANG ADVOKASI GURU P2G (IMAN ZANATUL HAERI, S.Pd.):

Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Pak. P2G.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

P2G. Pak Satriawannya, *nggak* dateng?

KEPALA BIDANG ADVOKASI GURU P2G (IMAN ZANATUL HAERI, S.Pd.):

Pak Satriawan sedang ada ini, ada urusan.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Biasa ikut sama saya juga, *podcast*. Lanjut.

KEPALA BIDANG ADVOKASI GURU P2G (IMAN ZANATUL HAERI, S.Pd.):

Oke, baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Pimpinan Sidang.

Kang Feri, kita sudah sering ketemu di beberapa *podcast* dan YouTube. Terima kasih kepada yang terhormat.

Bapak-Ibu Dewan di Komisi X yang sudah hadir,

Menyempatkan hadir dan memberikan kami kesempatan untuk berbicara di sini.

Perkenalkan diri, saya Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru.

Di sini juga telah hadir dari P2G di DKI Jakarta; Kang Ikna. Ada P2G di Kabupaten Garut, Kang Rida dan beserta jajaran pengurusnya. Kami dari P2G. Untuk *power point-nya*, maaf bisa ditampilkan? Oke, baik.

Terima kasih.

Baik, saya lanjut. Bahwa P2G adalah organisasi profesi guru, kami berbadan hukum dan memang, *next slide*. Pada hari ini, langsung saja, kami di sini hadir lima orang, *next slide*. Tetapi kemudian, kami membawa data kurang lebih 466 kasus guru-guru honorer. Beberapa di antaranya di Jawa Barat, Kuningan, Garut dan sekitarnya. Ini adalah guru, yang terbukti kami membawa datanya, ini ternyata guru honorernya tergeser dengan kedatangan guru P3K atau P1, itu masalahnya.

Nah, di antara para guru tersebut, juga ada yang sudah mengajar sejak tahun 2005. Pada intinya, ada tiga hal yang ingin kami sampaikan, yang pertama adalah latar belakang tadi, prinsip, dan juga kesimpulan. Ada tiga masalah utama sebetulnya dalam teman-teman guru-guru honorer ini.

Yang pertama adalah pemberhentian. Jadi, sekarang mungkin kalau saya boleh sebut ya, di ruangan sidang yang terhormat ini, di Indonesia secara menyeluruh, kami bisa menyebutkan seperti itu, sedang terjadi upaya untuk mengusir guru-guru honorer dari sekolah dengan cara-cara halus. Mungkin tidak ada suratnya, tetapi melalui *broadcast* verbal/non verbal, jamnya dikurangi, dan lain sebagainya. Jadi, ini fenomena yang menurut kami adalah fenomena nasional dan harus dideklarasikan di forum ini. Tanggal 4 Juli 2024, saya Iman Zanatul Haeri, menyatakan bahwa sedang terjadi pengusiran guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri, terutama.

Yang kedua, seleksi P3K ini menurut kami, kesimpulan kami dari beberapa tahun kami mengikuti isu ini, bahwa setiap kebijakan pendidikan terutama kebijakan seleksi P3K itu memetakonflikkan antar guru. Seperti teman-teman kami di sebelah di sini, ada forum guru honorer dengan banyak nama dan singkatannya. Mungkin Kang Ferdi lebih hafal karena sudah berkali-kali beberapa forum datang ke sini. Itu adalah hasil kebijakan seleksi P3K yang tidak adil. Ketika tidak adil, timbul korban, bikin forum lagi, dan ke sini lagi, dan begitu seterusnya.

Saya kira ini bukan hanya sebuah masalah, tapi ini adalah sebuah masalah yang sangat sistemik dan terus berulang. Jadi, kami kira kita harus punya solusi yang agak ekstrem untuk menghentikan ini, gitu. Itu yang kedua. Jadi, ini masalah akan berkelanjutan.

Yang ketiga, soal kesejahteraan. Meskipun kami kemudian di sini hadir untuk menyuarakan teman-teman guru honorer, tetapi kemudian juga dalam seleksi ini, kami menilai ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh guru, baik guru honorer, baik guru P1 ataupun P2. Bagi guru-guru yang menunggu seleksi ini dari tahun 2021, 2022 dan 2023, tidak ada yang bertanggung jawab bagaimana hidup mereka mempertahankan dirinya, karena nanti kami juga akan melampirkan survei dari IDEAS Dompot Dhuafa.

Dompot dhuafa aja sampe ikut campur ya, *alhamdulillah* luar biasa, untuk melakukan survei terhadap ribuan guru yang ternyata salah satunya guru-guru honorer, termasuk guru-guru P3 P1 itu. Itu juga harus bekerja serabutan jadi ojol, menjadi penceramah shalat Jum'at kadang-kadang ya

lumayan amlopnya, kadang menjadi penulis. Saya juga penulis, sebetulnya. Kita berusaha keras untuk mempertahankan hidup.

Jadi, bisa dibayangkan tidak? Bagaimana untuk jalan ke sekolah saja itu tidak ada gitu, untuk untuk sekedar tenaga makan gitu, ya. Jadi, ini isu yang sangat harus diselesaikan. *Next slide.*

Makanya kemudian, kerugian guru ini yang pertama, karena menunggu dan yang kedua sudah saya sebutkan tadi dan ini juga biaya dari kehilangan jam yang secara perlahan guru-guru tersebut harus. Jadi, bukan karena dia hobi dengan bimbel, pekerjaan lain, bukan. Karena ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup, karena sangat tidak layak sekali situasinya. *Next slide.*

Ini adalah survei IDEAS yang dilakukan oleh Lembaga Dompot Dhuafa. Bagaimana, ini adalah data-data yang sangat nyata bahwa para guru tersebut berhutang kepada guru, menggadaikan SK. Ya, honorer *nggak* punya SK, apa yang digadaikan? Gitu. Meminjam ke teman, *handphone*-nya digadai sampai dua kali, dan lain seterusnya. Jadi, ini kondisi yang sangat tidak memartabatkan. Nanti, mungkin akan saya tunjukkan *slide* tahun ini, Sekjen PBB itu mengadakan "Panel Tingkat Tinggi" yang menyatakan bahwa guru itu harus dimartabatkan dan harus dimanusiakan. Jadi, kami kira kondisi guru honorer termasuk juga guru-guru yang sedang menunggu di P1, ini juga sama-sama tidak bermartabat. *Next slide.*

Nah, secara teknis, ini mungkin kami ulas ya selama 3 tahun terakhir. Ada empat hal sebetulnya yang menjadi persoalan teknis kita.

Yang pertama, analisis jabatan. Nanti akan didetailkan oleh teman-teman dari P2G yang lain. Tetapi, intinya data kita itu kusut. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Panselnas dan lain sebagainya, ini sangat kusut. Analisis jabatan dari tingkat sekolah, Dapodik, Dinas Pendidikan, sampai pemerintah itu tidak ada yang benar-benar sinkron.

Kami sebetulnya ya berpikir positif ketika kita punya menteri yang di bidang teknologi eh teknologi informasi, artinya sangat hafal tentang data, tapi ternyata 5 tahun ini terbukti bahwa data kita malah makin kusut. Ada guru-guru yang mengajar bukan bidangnya, termasuk juga kasus guru agama, ada guru matematik SMK ngajar matematik, kemudian ada kedatangan guru P3K, jam matematiknya berkurang setengahnya, datang lagi guru matematika P3K berkurang lagi sampai 0 jam. Kemudian, sekolah mungkin karena kasihan, diberikan jam pelajaran agama, akhirnya ngajar pelajaran agama. Di ajar pelajaran agama, datang lagi P3K agamanya, jadinya kosong.

Situasi hari ini, guru-guru honorer, itu disebut hidup tidak hidup, disebut mati masih hidup dan statusnya tidak jelas di sekolah. Dia makhluk apa itu *nggak* tahu. Apakah dia datang ke sekolah itu sebagai apa? Dia juga *nggak* jelas. Dan ini kegentingan bagi teman-teman guru. Termasuk seperti disampaikan oleh teman-teman GPAll tadi, bahwa kita mengalami kecemasan yang luar biasa.

Kebetulan di Jawa Barat juga ada penelitian yang dilakukan oleh Steering Committee Jabar Masagi di Disdik Jabar, salah satu psikolog namanya Ibu Hanifah Misbah itu melakukan survei terhadap guru-guru, sekitar 2.306 guru, dan hasilnya guru-guru ini pada stres. Tapi, stres mereka yang tingkat utamanya adalah ketika tidak bisa melayani murid.

Jadi, bukan hanya soal kesejahteraan, stres utama para guru-guru ini termasuk guru P1, guru honorer juga, ini ternyata ketika tidak bisa melayani. Misalkan apa? Mengajar bukan bidangnya dan guru matematika yang terpaksa mengajar agama, dan sekarang juga tidak tahu jamnya kosong. Ini contohnya di sebelah saya, Kang Rida, ngajar di SMK di Jawa Barat, emang bisa ngajar agama? Bayangkan gitu ya, bagaimana kualitas agama rakyat Indonesia kalau begini caranya. Maaf ya Kang Rida ya, bukan saya ini, tapi kan tidak kompetensinya belum tentu juga, gitu kan.

Yang ketiga adalah relokasi. Jadi, proses pengusiran guru-guru honor dari sekolah, ini menggunakan relokasi dan redistribusi, gitu. Seolah-olah ada yang dipindahkan, padahal jamnya berkurang. Jadi, kami ulangi lagi, kita harus mendeklarasikan hari ini, ini terjadi pengusiran besar-besaran, PHK besar-besaran secara massal, tetapi diklusterkan di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap sekolah. Akhirnya, para guru honorer hanya mendapatkan apa? Tekanan-tekanan secara verbal.

Dan yang ketiga adalah jaminan regulasi. Sama, dengan teman-teman GPAIL, bahwa kita juga ingin ada jaminan. Jangan sampai, guru-guru honor ini di PHK, gitu ya. Selanjutnya, *next slide*.

Kami juga berkomunikasi dengan Dirjen GTK, Prof Nunuk, yang mengatakan bahwa di dalam apa namanya? Permendikbud ya Nomor 349 ini sudah ditentukan bahwa guru honorer itu tidak akan tergeser oleh guru-guru P3K atau P1. Tetapi, kenyataannya tidak seperti itu. Ada 466 kasus yang berhasil kami kumpulkan, padahal itu bukan tugas kita ya mengumpulkan seperti itu. Lanjut.

Yang pertama, misalkan data di Jawa Barat ini ya, bahkan kemudian 800 guru bukan hanya 466, jamnya ternolkan. Jadi, saya kira ini sangat-sangat miris sekali. Yang kedua, pergeseran tadi sudah saya sebutkan. Yang ketiga, itu adalah soal kebutuhan tidak sesuai dengan kuota, 10% juga tidak. Kebutuhannya 11.000 sekian, tetapi yang di kuota yang dikeluarkan hanya 1.500.

Lalu, juga afirmasi sertifikasi pendidik. Mohon maaf, kita semua sebetulnya, seluruh guru di Indonesia itu berhak, apalagi Undang-Undang Guru Indonesia sudah lewat 10 tahun, ya. Jadi, sudah ada pelanggaran terhadap undang-undang sebetulnya, ketika ada guru yang belum tersertifikasi. 1,6 juta, yang tadi disebutkan juga termasuk.

Lalu kemudian, ketika guru-guru honorer ini ikut seleksi P3K, *start*-nya berbeda. Kenapa? Misalkan teman-teman guru swasta sudah sertifikasi karena mudah ngurus Dapodik, mudah mengurus untuk NUPTK, guru-guru di sekolah negeri honorer itu berliku-liku sekali.

Kami juga mendapatkan beberapa laporan-laporan seperti harus bayarlah, dipersulitlah, dan lain sebagainya. Lika likunya berbeda. Jadi, teman-teman guru honor ini apa namanya? Tantangannya lebih berat lagi, bahkan untuk mendapatkan status di Dapodik maupun NUPTK. Lanjut. Itupun ketika PPG, ngantri lagi Pak, kita Pak, belum tentu gitu. Seperti ngantri haji. Ini berapa data sudah kami lampirkan. *Next slide* bisa dibaca.

Bapak-Ibu dewan yang terhormat,

Ini kasus di DKI Jakarta, jangan, bukan hanya guru honorer, tapi guru-guru P3K juga. Kami kira, secara umum P3K ini sebetulnya secara riil kalau kita bandingkan dengan profesi lain, ini tidak sangat menjamin. Di DKI Jakarta temuan 2023, kami melihat ada guru-guru yang dikontrak hanya satu tahun, kemudian juga jamnya tidak mencukupi, itu ada 200 data. Ketika kami mengkonfirmasi ini, kami dari P2G, secara verbal disampaikan oleh oknum Dinas Pendidikan DKI Jakarta, akan mensomasi P2G karena kami merilis data ini.

Jadi, salah satu rekomendasi kami, tolong jangan diintimidasi dong, gitu. Karena, saya sendiri yang diintimidasi saat itu, gitu ya. Jadi, sudah *mah* kita berjuang, *nggak* ada uang, *nggak* ada ongkos, statusnya *nggak* jelas, diintimidasi. Jadi jadi, ini kondisi pendidikan di Indonesia yang harus dijelaskan secara terang-benderang melalui ruangan rapat yang terhormat ini. Selanjutnya. Ini nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Kabupaten Garut. Selanjutnya, selanjutnya.

Nah, ada empat hal prinsip yang saya kira, secara tidak langsung, kita akan sepakat. Pertama guru, dalam Undang Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, tidak ada guru P3K, tidak ada guru negeri, tidak ada guru swasta, yang ada hanya guru. Maupun guru dengan ketentuan guru yang profesional, dia tersertifikasi, dianggap layak untuk mengajar secara formal di atas kertas.

Jadi, saya kira seleksi P3K yang kebijakan pendidikan hari ini, itu memecah belah para guru secara horizontal maupun vertikal. Jadi banyak forum, perjuangannya terpisah, kita datang ke sini lagi, gitu dan lain sebagainya. Setiap tahun seperti ini dan saya kira ini tidak menyelesaikan masalah.

Yang kedua adalah seleksi P3K ini, perlu kami tekankan, bukan solusi. Dan yang ketiga adalah, sekali lagi tolong jangan PHK guru honorer. Selanjutnya. Ini adalah amanah dari Sekjen PBB yang mungkin akan saya saya sampaikan ulang.

- Yang pertama, kemanusiaan. Kondisi guru P1 yang menunggu, tidak sangat manusiawi. Termasuk juga guru honorer yang tidak jelas.
- Yang kedua, martabat. Jadi kita diingatkan kalau pemerintah Indonesia eksekutif ini tidak punya visi tentang tujuan pendidikan nasional, ini ada visi pendidikan secara internasional dari PBB.
- Yang ketiga, keadilan keberagaman dan inklusif. Berdasarkan fakta-fakta yang tadi, saya kira tidak memenuhi unsur ini.
- Keempat kualitas. Bagaimana mungkin kita bisa berkualitas kalau kesejahteraan juga tidak terpenuhi?
- Inovasi dan kepemimpinan. Ini juga menjadi konsentrasi kami. Pelatihan guru kepemimpinan, guru penggerak. Tetapi, PPG saja tidak selesai, kuotanya jauh lebih kecil daripada guru penggerak. Jadi, kami bingung. Ada kepemimpinan tapi satu sisi tidak profesional.
- Yang keempat, yang terakhir adalah keberlanjutan. Dan kami kira yang harus menjadi keberlanjutan adalah tujuan pendidikan nasional bukan keberlanjutan program menterinya.

Saya kira itu. Selanjutnya. Ini beberapa curhatan teman-teman guru yang saat ini apa ya? Disebut, taraf hidupnya itu sudah sudah hutangnya itu sudah ke mana-mana gitu, kalau saya sebut, gitu. Dan dan bantuan dari Komisi X tentu saja ini akan sangat membantu. *Next slide.*

Kesimpulan kami.

- Yang pertama adalah analisis jabatan di Indonesia dalam seleksi P3K dan kebijakan pendidikan secara umum, ini masih amburadul. Jadi, ya maaf ya, mungkin data nasional kita juga memang amburadul ya. Tetapi, *wabilkhusus* untuk pendidikan dan juga untuk mengurus guru, ini tambah amburadul.
- Status kontrak, intimidasi, kami harap tidak dilanjutkan lagi kepada siapapun pihak yang melakukan itu, karena guru harus otonom, guru itu mengajar muridnya dan ini adalah calon-calon anak di masa depan.
- Yang ketiga adalah, termasuk juga kekusutan data menyebabkan guru honorer menjadi korban paling bawah.
- Dan yang terakhir adalah kebijakan terhadap guru yang berubah-ubah, tersegmentasi vertikal maupun horizontal, ini menyebabkan peta konflik guru, dan saya kira ini sangat tidak baik untuk masa depan pendidikan dan guru kita.

Selanjutnya rekomendasi dari kami.

- Para guru honorer harus tetap mendapatkan jam ajarnya.
- Yang kedua, berikan kepastian dan kesempatan guru honorer untuk tetap mengikuti seleksi P3K yang “berkeadilan”, kata kuncinya.
- Yang ketiga, mengimbau kepada semua pihak, sekali lagi kami sampaikan baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk tidak

melakukan intimidasi terhadap guru yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

- Yang keempat, seleksi P3K bukan solusi permanen. Kita dari P2G tetap mengajukan seleksi PNS dibuka. Selanjutnya.
- Ini ada usulan juga agar dihidupkan kembali skema DPK (guru bantu) jika memang apa? Kuota untuk sekolah negeri tidak mencukupi, itu usulan.
- Selanjutnya adalah meminta komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk tidak memberhentikan para guru honorer.
- Yang selanjutnya adalah gagasan upah minimum guru nonASN, karena ASN sudah ada undang-undangnya, terus didorong agar menjadi solusi konkret. Di Undang-Undang Guru dan Dosen sudah ada di Pasal 14, bahwa guru itu layak mendapatkan apa? Kebutuhan di atas minimum, di atas. Jadi, kalau UMR-nya mungkin 2 juta 2 ratus, ya dia 2 juta 3 ratus dan seterusnya, gitu.
- Dan selanjutnya, kami meminta agar seleksi P3K itu dituntaskan, jangan tersisa. Karena, yang sisa ini jadi korban, bikin forum lagi, ke sini lagi, dan itu tidak akan selesai. Akhirnya, banyak rentetan korban, gitu. Selanjutnya.

Itu saja mungkin dilanjut kepada Kang Rida.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Terima kasih.

KEPALA BIDANG ADVOKASI GURU P2G (IMAN ZANATUL HAERI, S.Pd.):

*Wallahu wafiq ila min thoriq,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Kang Iman Zainatul Haeri.

Nih, kalau yang biasa diskusi sama saya cepat-cepat, tahu permainan saya cepat. Kami, hadir sini Pak Iman, terus ada Pak Ikna?

KEPALA BIDANG ADVOKASI GURU P2G (IMAN ZANATUL HAERI, S.Pd.):

Pak Rida dari.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Pak Ikna, Pak Rida, Ibu Dian.

KETUA P2G GARUT (RIDA RODIANA, S.Pd.):

Baik, izin menyampaikan.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Saya absen dulu.

KETUA P2G GARUT (RIDA RODIANA, S.Pd.):

Oh iya, baik.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Bu Dian, *nggak* ada?

KEPALA BIDANG ADVOKASI GURU P2G (IMAN ZANATUL HAERI, S.Pd.):

Bapak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Oh Bapak. Mohon maaf maaf. Habis Dian, cuma pakai putra, kalau putri langsung.

Muhammad Farhan Kusnadi? Ya, *mangga*. Silakan ada pendapat? Singkat, padat, jelas, ya.

KETUA P2G GARUT (RIDA RODIANA, S.Pd.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Bapak Haji Ferdiansyah yang saya muliakan,

Sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Iman terkait kondisi guru nonASN yang saat ini di provinsi Jawa Barat, khususnya, dan umumnya di Indonesia.

Perkenalkan, saya Rida Rodiana sebagai ketua P2G Kabupaten Garut dan Kabid Pengembangan Organisasi Serikat Guru Indonesia.

Saat ini saya berstatus..

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Potong dulu. Sama Fagar kompak *nggak*?

KETUA P2G GARUT (RIDA RODIANA, S.Pd.):

Oh Nggak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Oh nggak kompak, ya udah.

KETUA P2G GARUT (RIDA RODIANA, S.Pd.):

Berbeda itu, Pak. Ya.

Kebetulan, saya sebagai nonASN di salah satu SMA negeri di Kabupaten Garut, yang pada tahun 2023-2024 saya sudah tidak mengajar secara linear lagi, Pak.

Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama aspirasi dari teman-teman nonASN yang ada di Jawa Barat khususnya. Bahwa benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Iman, bahwa saat ini guru nonASN seakan-akan dicampakkan, Pak. Dulu, sebelum ada adanya P3K, kami diberikan beban kerja yang sebegitu banyak, Pak ya. Namun, setelah kedatangan P3K, kami tergeser Pak jamnya. Bahkan, kasus di Jawa Barat, 466 guru itu 0 jam Pak, 0 jam ya. Artinya, secara umum, mereka tidak mendapatkan jam sama sekali, Pak. Mereka hanya datang ke sekolah, datang tidak jelas, balik lagi ke rumah gitu ya dan tidak digaji Pak, karena nonASN itu digaji sesuai dengan jam, ya.

Ditambah lagi, pada saat seleksi P3K tahun 2021, itu jelas terdapat afirmasi yang sangat besar yang notabene itu mudah sekali didapatkan, terutama di swasta. Tapi, bagi kami nonASN yang ada di negeri, itu sulit Pak. Sulit sekali kita dapatkan sertifikasi tersebut, karena kita harus mendapatkan SK dari pemda dan itu sulit untuk didapatkan. Bahkan, NUPTK saja kita sulit Pak, gitu. Tapi kalau dari, teman-teman dari swasta, itu dipermudah. Hanya dengan menggunakan SK dari Yayasan, itu bisa langsung mendapatkan NPK dan bisa langsung mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PPG.

Kami juga sudah bertemu dengan Kabid GTK, di sana menyatakan bahwa jumlah formasi yang diajukan untuk untuk Provinsi Jawa Barat itu sejumlah 1529 ya. Sedangkan, kami juga mendapatkan data bahwa sisa P1 yang dari Jawa Barat itu sebanyak 1529 juga. Lalu, bagaimana nasib kami nonASN yang ada di negeri, saat ini? Terutama yang ada di SMA, SMK, dan SLB negeri.

Perlu diketahui, Pimpinan, bahwa jumlah nonASN yang terdaftar saat ini, untuk di Provinsi Jawa Barat, itu sejumlah .. (suara putus-putus dari menit 34.24 – 34.34) melihat jumlah APBD yang disampaikan untuk Disdik Jabar, itu mencapai 11 triliun.

Disdik Jabar selalu berlindung dibalik APBD, dibalik tidak adanya anggaran untuk pengangkatan jumlah P3K tahun ini. Namun, kami melihat jumlah APBD Disdik Jabar itu sampai mencapai 11 triliun. Bahkan, untuk Kabid

PSMA dan PSMK, itu dijumlahkan sekitar 5,4 triliun. Sisa, sisa honorer atau nonASN saat ini yang ada di sekolah negeri, itu hanya 8.974.

Saya sudah menghitung jumlahnya pimpinan. Saya sudah menghitung jumlah gaji beserta TPP-nya. Apabila dijumlahkan selama 1 tahun, itu hanya mencapai Rp464.853.200.000. Apabila ditambah dengan tendik, itu mencapai Rp599.493.200.000. Itu tidak sampai menyentuh 8,6% dari APBD yang diberikan untuk Kabid PSMA dan PSMK. Jadi, kenapa Disdik Jabar selalu berlingung bahwa pengangkatan jumlah P3K saat ini, jumlah...(rekaman terputus 35.54) itu karena tidak ada anggaran, padahal anggarannya sangat banyak. Jadi, mohon sekali Pimpinan, untuk diperhatikan. Mohon sekali untuk diperhatikan, ya.

Kemudian selain itu, Pimpinan, kemarin juga kami menonton tayangan di Komisi X, itu akan ada moratorium formasi, itu cukup mengiris hati kami Pak, sebagai nonASN. Karena, kami menaruh harapan di tahun ini, sesuai dengan Undang-Undang 20... (rekaman terputus menit ke 36.26) Tahun 2023, bahwa nonASN atau nama lainnya, wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Artinya, setelah Desember 2024, nasib kami itu seperti apa, Pak?

Jadi, mohon sekali Pimpinan, untuk diperhatikan nasib nonASN ini, karena benar sekali survei yang sudah disebutkan oleh Pak Iman tadi. Saya sendiri Pak, sebenarnya saya suka mengikuti acara Bapak di Kabupaten Garut di acara perfilm Pak, karena saya juga sama, senang film gitu Pak. Itu jalan sampingan saya untuk mendapatkan penghasilan Pak. Apabila saya sudah sejahtera, mungkin sebagai guru, saya akan fokus untuk mengajar gitu, ya. Dan bahkan, teman-teman kami di di Jawa Barat itu ada yang sampingannya sampai luar biasa, Pak. *Nah*, seperti itu.

Kami juga sangat menekankan karena... (rekaman terputus dari menit 37.25 - 37.35) itu mohon untuk di diperhatikan Pak, gitu ya. Mungkin itu saja untuk yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih, sekali lagi, terima kasih atas kesempatan dari Pimpinan pada kami.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Walaikumsalam.

Lanjut ke siapa yang ke-3? Nomor tiga datangnya. Dari? Oh KCD XII. Jadi, ini dari Forum Guru Prioritas Pertama, P1 ya? Udah kayak parkir P1 P2 P3. KCD XII Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kami, silakan singkat, padat, jelas. Ini di sini isinya dapil saya semua, nih.

Tapi, sebelum menyampaikan, nanti supaya juga semangat, tolong yang mengatasmakan Indonesia itu juga diformat di. Misalnya tadi P2G 466

kasus, titiknya di mana? Supaya nanti kan di sini ada Bu Lisda, ada Pak Adrianus, ada Pak Zainuddin Maliki yang hadir, dan juga teman-teman kami kan terbagi di 28 Dapil nih kan, Pak. Jadi kalau bisa, jadi satu persatu. Memang tidak, tidak mungkin kita selesaikan secara sporadis.

Nah, melalui teman-teman yang hadir, yang ada di Komisi X, kan siapa tahu bisa satu dua terselesaikan. Jadi, kalau yang memang yang disampaikan Bapak-bapak itu kita kan tahu titiknya, penyebabnya, penyakitnya kan kita *nggak*, kan seorang dokter juga harus tahu asal mula daripada riwayat hidup si penyakit, kan gitu. Kalau itu, akan lebih baik untuk mempermudah menangani pengobatan selanjutnya. Kira-kira kan gitu, kalau bicara penyakit ini ya.

Kami persilakan dari forum P1 KCD XII kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Singkat, padat, jelas.

Silakan yang menyampaikan, Pak Opa. Pak Opa, siapa lagi yang hadir?

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA KCD XII (OPA HIDAUL WADA, S.P.):

Bu Lena, Pak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Bu Ratnasari, mana?

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA KCD XII (OPA HIDAUL WADA, S.P.):

Ada, Pak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ibu Lena? Hadir. Silvi? Hadir. Sudarmono? Kalau Jawa Barat Sudarmana dong. Ya bagus. Lanjut.

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA KCD XII (OPA HIDAUL WADA, S.P.):

Izin Pimpinan.

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi X dan anggota Komisi X yang saya hormati,
Yang saya hormati Ketua Forum Guru yang berada di sini.**

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Maaf, saya bukan pimpinan, tapi mantan pimpinan. Jadi, anggota semua di sini, cuma diamankan.

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA KCD XII (OPA HIDAUL WADA, S.P.):

Oh iya, mohon maaf, Pimpinan.

Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan yang berada di ruangan ini,

Pertama-tama, kami mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Karena, sudah mempersilakan kami untuk bisa menyampaikan aspirasi kami, khususnya untuk P1 dari swasta, Pak, yang belum mendapatkan penempatan.

Mohon izin, Pak, kalau bisa tolong *slide*-nya, Pak. Iya Pak, perkenalkan ini forum kami, Forum Guru Prioritas Pertama KCD XII. *Next slide*, Pak.

Informasi tentang guru P1 atau Guru Prioritas Pertama. Di sini, guru status lulus *passing grade* seleksi ASN P3K tahun 2021 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2023 kemarin, Pak. Terus, kami berasal dari guru sekolah SMK, SMA, SLB negeri dan swasta di bawah naungan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ya.

Nah terus di sini, jumlah sisa guru P1 untuk Provinsi Jawa Barat, setelah kami silaturahmi sama BKD dan Disdik Jabar di bidang GTK, itu sebanyak 1.529, Pak. Dilanjut.

Nah, kondisi guru P1 ini, teman-teman kami yang belum mendapatkan penempatan, Pak. Pertama, guru P1 ini sudah banyak yang diberhentikan, Pak, dari sekolah swasta karena menyandang status P1-nya.

Nah terus yang kedua, guru P1 ini kebanyakannya itu kalau melamar lagi Pak, karena untuk menghidupi keluarganya dan menghidupi dirinya sendiri, itu sudah banyak yang ditolak karena statusnya yang, statusnya P1 itu, Pak. Jadi, tidak diterima mau melamar ke sekolah-sekolah yang swasta yang lainnya. Terus di sini, guru status P1 ini jam mengajarnya itu juga sudah dikurangi, Pak. Misalnya, tidak dikeluarkan, tapi sedikit demi sedikit, semester demi semester tuh jamnya sudah dikurangi. Lanjutnya, Pak.

Nah, setelah kami kemari bersilaturahmi, ternyata dukungan dari Provinsi Jawa Barat kepada kami, khususnya P1, itu mengusulkan formasi katanya 1.529 kepada pemerintah pusat. *Nah*, dan juga kami jumlahnya hanya sekitar 1.529 untuk katanya untuk, hanya untuk guru P1, kata BKD dan Distrik Jabar. Selanjutnya.

Nah, di sini Pak, kami ingin menyampaikan tuntutan kami kepada eh melalui melalui Komisi X kepada kementerian terkait, mungkin. Tolong Pak segera selesaikan Guru Prioritas Pertama yang sisanya, yang belum mendapatkan penempatan, agar mendapatkan SK P3K di tahun 2024 ini, Pak. Karena, kami juga tidak ingin dibeda-bedakan sama teman kami yang kemarin sudah dilaksanakan penempatan, Pak.

Terus yang kedua, tolong regulasi ini, khususnya terkait kemarin itu kami berkoordinasi dengan PanRB, katanya seleksi sekarang itu kan itu menurut Undang-Undang ASN tahun 2002 2023 ini. Pertama, itu tentang THK II yang akan dihabiskannya sekarang, terus nonASN yang terdata di *database* BKN, dan yang selanjutnya itu nonASN yang apa namanya? Yang masih mengajar aktif di sekolah negeri. Selanjutnya.

Nah selanjutnya, kami mohon juga regulasi dari pemerintah pusat untuk pengadaan jabatan ini, guru fungsional ini, harus adil Pak, tidak membedakan antara guru P1 negeri dan guru P1 swasta. Karena, kami itu kemarin itu sama-sama, Pak, tes. Di 2021 itu sama-sama tes, dan sama-sama kami memenuhi ambang batas, Pak. Sudah memenuhi syarat untuk diseleksi tahun 2021 ini.

Yang selanjutnya kami memohon, kami ingin disamakan, Pak. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 dan 2023, bahwa untuk P1 P1 ini diselesaikan Pak dengan hanya daftar ulang dan langsung penempatan. Selanjutnya. *Nah* terus, kami juga yang belum penempatan itu, tolong diberikan SK sesuai domisili, Pak. Seperti teman-teman kami yang kemarin penempatan.

Terus, kami menuntut kepada kementerian terkait untuk segera buat dan selesaikan PermenpanRB, KemenpanRB, serta Juknis Kemendikbudristek untuk pengadaan P3K di tahun 2024 ini sebelum bulan Oktober, Pak. Kami memohon bantuannya kepada Komisi X untuk menekan supaya cepat diselesaikan.

Nah terus yang selanjutnya, supaya tidak ada kata menggeser honor negeri, kami juga siap Pak untuk diperbantukan menjadi DPK di sekolah swasta. Karena, kan kami juga tidak mau Pak menggeser mereka ya seperti itu. Selanjutnya.

Nah, untuk kesimpulannya kami guru P1 belum penempatan, baik karena kami di bawah naungan Jawa Barat ya Pak maupun seluruh Indonesia, sangat berharap dan memohon Bapak dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari ... (rekaman terputus 46:12) ini dapat membantu kami untuk mendorong regulasi pemerintah pusat agar regulasi seleksi ASN P3K di tahun ini berpihak kepada kami, P1 juga, Pak.

Buatkanlah, misalnya, Permenpan ataupun Kemenpan turunannya untuk Kemendikbud ini agar bisa berpihak kepada kami, khususnya untuk P1. Dan kami juga berdoa kepada Bapak dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi X, selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap kegiatan yang akan Bapak-Ibu kerjakan, terutama untuk membantu kami, Pak, untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan.

Mungkin dari saya. Nanti, teman-teman, Pak, ada yang yang menambahkan. Terima kasih, Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Waalaikumsalam.

Ada mau nambahkan? Singkat, padat, jelas.

Kalau *nggak*, geser aja, Pak. Maju aja Pak, Pak, biar cepat, Pak. Maju, maju.

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA KCD XII (SUDARMONO, S.Pd.):

Baik.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

“Buah cipir bunganya sedang merkah,
Mudah-mudahan yang hadir hidupnya berkah”.

Menambahkan, Pak. Yang disampaikan beberapa teman kami, bahwa di antara kami, guru itu untuk mencukupi kebutuhannya sangat prihatin. Pribadi saya, saya setiap pagi jam setengah 5 pagi itu mempersiapkan dagang kerupuk Pak, berkeliling Pak. Honor kami sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan pendidikan putra-putri kami. Sangat sedih Pak, kalau diceritakan.

Singkat cerita, setelah saya berkeliling menjual kerupuk dari warung ke warung sampai pasar, langsung kami berangkat ke sekolah Pak, untuk menjalankan kewajiban kami sebagai anak bangsa, mendidik anak bangsa agar anak bangsa ini menjadi orang-orang yang bagus. Bahkan kami sudah 20 tahun, mohon maaf, putra-putri kami yang sudah kami didik sudah menjadi orang-orang yang besar, sementara kami hanya berkeliling menjadi pedagang kerupuk.

Bahkan, ada murid kami yang singgah kepada kami, “kok Bapak masih berjualan kerupuk?”. Masih setia mendidik putra-putri bangsa yang untuk bangsa ini agar maju dan terbentuk pribadi-pribadi yang bagus. Tapi, ketika kami sudah masuk P3K, kami tergusur oleh anak-anak bangsa yang baru umur 3 pun mengabdikan sebagai pendidik.

Bahkan, kami lihat tadi ada yang tidak linier. Kami linieritas test Bahasa Inggris, kami digeser. Sementara, 3 tahun mengabdikan, melamar dengan sosiologi, menggeser kami yang bahasa Inggris.

Mohon, kiranya semua ini bisa diperhatikan. Semoga P3K ini *passing grade* 1 senantiasa dikabulkan oleh Allah untuk menjadi P3. *Allahu Akbar!*

Terima kasih, *akhirul kalam.*

Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Walaikumsalam.

Ya, nih. Baik, cukup ya? Dilanjutkan yang nomor, datang nomor 4 siapa? Oh ya. Dari Lampung Utara. Oh ya yang ini tadi, Guru 10+, Lampung Utara.

Silakan, Bu Hera Yunita Sari.

KETUA GHN 10+ LAMPUNG UTARA, (HERA YUNITA SARI, S.Pd.):

Hera Yunita Sari.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya silakan, Bu.

GHN 10+ LAMPUNG UTARA, (HERA YUNITA SARI, S.Pd.):

Baik, Bapak.

Terima kasih sebelumnya, saya sudah dikasih kesempatan untuk berbicara di sini dan di sini saya akan menyampaikan aspirasi yang ada di kabupaten saya. Sedih saya, Pak. Saya tarik napas dulu, ya Pak ya. Sedih kami, Pak.

Kami sudah 3 tahun eh 4 tahunlah sampai sini. Kami *nggak, nggak* dibuka Pak formasi kami Pak, di Kabupaten kami. Kapan Pak kami selesainya, Pak? Tolong, kalian sebagai Bapak orang tua kami, kapan Pak? Bahkan Pak, dengan gaji beraneka ragam di tempat saya itu Pak, dari 50, 100. Bahkan saya Pak, buat ganti ban aja Pak, aduh gimana? Ya, gaji berapa ratus ribu, Pak. Tolonglah. Dan ini kesempatan kan buat kami, pembukaan P3K, tapi kami tidak dibuka Pak, alasan anggaran lagi, Pak.

Mohon Pak, kiranya bantu tolong kami, Pak. Tuntaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa “semua tenaga honor tanpa terkecuali, harus diangkat paling lambat 24 Desember 2024 dengan tanpa syarat ketika sudah menjadi honor selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus”.

Itu kan sudah jelas undang-undangnya. Tapi kapan, Pak? Kami mau nyatanya, Pak. Kami mau nyatanya Pak. Sudahlah, saya rasa masa kerja saya sudah cukuplah 14 tahun, ya Pak ya, untuk mendapatkan gaji yang layak itu. Mau Pak, pengen Pak, kami gaji segitu, Pak. Tapi, apa daya, Pak? Kabupaten kami *nggak* buka, *nggak* buka, Pak. Padahal pemerintah ini sudah mempermudah, mempermudah sekali dengan apa namanya? Ada prioritas satu, prioritas dua, prioritas tiga. Dan kabupaten yang buka di Lampung, itu *alhamdulillah* habis Pak, honor. Kami Lampung Utara bagian apa, Pak? Sampai saat ini kami tidak membuka, Pak. Tolonglah sebagai wakil kami, Pak. Saya mau undang-undang, undang-undang itu ya dia nyatalah, Pak. Nyata dan secepatnya kami mendapatkan gaji yang layak.

Sedih, Pak. Beli ban motor saja Pak, nunggu, nunggu uang. Bapak tahu? Jarak sekolah saya 1 jam Pak dari rumah. Bahkan, itu bukan ngelewatin kota, hutan ketemu hutan Pak saya jalan, Pak. 14 tahun itu. Lihat ban motor itu Pak, ya Allah ini tipis apa *nggak*, geret motor itu Pak. Sangking Pak, kena uang itu, uang kami pas-pasan itu, lingkupan itu.

Mohon kiranya Pak, bantu kami Pak. Tuntaskan Pak, angkat Pak. Kalau bisa tanpat test Pak, kami Pak. Kasihlah kami ini gaji yang layak, Pak. Saya rasa cukuplah pengabdian kami, Pak. Sedangkan, ada murid saya yang sudah jadi tentara, kadang kami ketemu, ya gimana? Sedangkan, saya tetap menjadi honor, Pak.

Bantu kami Pak, tuntaskan Pak sesuai dengan undang-undang itu. Kalau bisa secepatnya, secepatnya diangkat di paling lambat di undang-undang itu kan 24 Desember 2024, diangkat tanpa syarat. Angkatlah kami Pak, angkat. Kalau bisa seluruh Indonesia ini angkat tanpa syarat Pak, angkat Pak. Kami butuh Pak, kami butuh uang Pak. 300.000 Pak, sehari Pak minyak aja saya 20.000 nih Pak. Ini pribadi saya, tapi Bapak perlu tahu. Belum jajan saya, kadang sudahlah tak usah jajan yang penting nyampe. *Nggak* kasihan, Bapak?

Bahkan, masih ada yang lebih senior dari saya Pak, belum Pak diangkat. Nangis-nangis sama saya. "Ibu, Ibu harus berjuang", 2 tahun lagi pensiun Pak, masih honor Pak, karena apa? Karena kabupaten kami *nggak* buka Pak, Lampung Utara. Sedih.

Harapan saya Pak, undang-undang itu secepatnya lah, Pak. Kami mau nyatanya Pak, nyatanya, kenyataan, Pak. Angkatlah kami, Pak. Bantu kami Pak, bantu kami. Apalah daya kami, Pak? Tolong kami Pak, Komisi X tolong, tolong kami, tolong kami, agar kami mendapatkan gaji yang layak, gaji yang layak. Dari, dari 50.000 Pak, gaji saya Pak pertama saya honor, Pak. Naik, naik, naik ini *alhamdulillah* dapat 300.000, *alhamdulillah*. Bahkan, ban motor saya aja pak, saya mikir-mikir Pak. Bayangin Bapak, buat gentinya gimana?

Nah, untuk itu Pak tolonglah perjuangkan nasib kami Pak, angkat kami Pak. Saya *nggak* muluk-muluk Pak, angkat ASN P3K, jadilah buat saya, Pak. Dan satu Pak, tolong guru jangan dibedakan Pak. Paruh waktu, tolong guru, kalau guru ya ya guru, ya guru satu Pak. Kenapa dibedakan ada paruh waktu? Kenapa, Pak? *Nggak* kasihan pandangan kami di masyarakat, Pak? Udah cukup Pak kami honor Pak dapat, ya mungkin Bapak tahulah dari masyarakat belum, terus ini mau dibedakan lagi paruh waktu kami diangkat. Kalau bisa Pak satu guru, ya guru ya satu, jangan ada bedanya Pak.

Itu saja yang saya sampaikan, Pak. Mohon Pak, tolong kami Pak, tolong kami Pak. Tolong angkat kami secepatnya Pak, sesuai Undang-Undang 20 Tahun 2023, mengangkat honorer itu. Angkat kami Pak, secepatnya Pak, dari honor yang 5 tahun.

Begitu aja, begitu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Maaf ini sebelumnya kalau ada salah-salah kata, ya Pak ya. Saya terbawa Pak. Ya, tapi memang ini kenyataannya Pak, kenyataannya. Ya, terima kasih, Pak. Ini akan disambung sama Ayu saya, di sebelah saya.

Tolong Pak, pikirkan Pak ya nasib kami Pak. Kasih Pak, kasihlah kami. Pemerintah, kasih kami gaji yang layak. Sampai kami kepikiran loh Pak mau ketemu sama Pak Prabowo, saking kami mau minta perlindungan ke mana kami, Pak? Saking Pak, ke mana kami minta Pak? Perlindungan Pak. Saking jalan ini gimana ini? Supaya kami diangkatkan, ada kepikiran seperti itu.

Kalau Pak Prabowo dengar, ya semogalah dituntaskan. Saking siapalah yang merangkul, memeluk kami. Sangking Pak, saking kami, siapa lagilah yang nolong kami kalau *nggak* ya wakil rakyat. Ya, seperti itu aja Pak yang saya sampaikan, Pak. Tolong tuntaskan, ya Pak ya.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Ini Ayu saya, Pak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya, silakan Bu.

GLPG LAMPUNG SELATAN (ESRO YULI DAYANTI):

Maaf Pak, izin berbicara.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua,

Perkenalkan Pak, nama saya Esro Yuli Dayanti, saya perwakilan dari GLPG Lampung Selatan, Pak. Memang beda ini ya Pak eh forum, cuma kami sama-sama dari Lampung. Kebetulan kami ketemu di Kemendikbud Pak, jadinya kami sekalian bareng.

Pak, di sini ada chatan sedikit dari kami GLPG Lampung Selatan Pak, P1 kami Pak. Kami berjumlah, sisa dari tahun 2021 itu 797, kemudian diangkat pertama 70 kemudian 100, 120 dan rencana 130 dan menyisakan sisa sebanyak 470, Bapak.

Yang kami inginkan Pak, Bapak bisa membantu kami. Untuk para Bapak Anggota Dewan, membantu penuntasan P1 Lampung Selatan, Pak. Di mana, kalau adik saya Hera mungkin bicara baru ingin ketemu Prabowo ya Pak, Pak Prabowo, tapi kalau kami GLPG Lampung Selatan, khususnya saya pribadi Pak, saya sudah mengejar Bapak Jokowi waktu pemantauan jalan di Lampung Tengah, Pak.

Kami kejar beliau dari Masjid Aira Pak. Kami kejar tidak bisa dipegang, kami ikut Pak. Beliau katanya mau naik pesawat, tapi ternyata beliau tidak mau Pak. Beliau ikut jalan naik mobil, sampai mobil beliau tersangkut pun kami tahu, Pak. Cuma kami tidak bisa mendekat saat mobil tersangkut, karena para ajudan presiden itu memang benar-benar, benar-benar menjaga ketat, Pak.

Alhamdulillah Pak, kami ketemu beliau di Simpang Randu, Pak. Saya sempat ber, berjabat tangan dengan beliau, beliau mencatat nama saya dan nomor serta sekolah saya, Bapak. Beliau berjanji mau menyelesaikan, namun sampai hari ini pun Pak, ternyata belum selesai untuk P1 Lampung Selatan.

Kalau dibilang kami nekat, jujur Pak, kami sangat nekat. Bukan hanya memperjuangkan P1 Lampung Selatan, tapi seluruhnya. Mengapa Pak? Karena Lampung Selatan itu adalah juara ke-2 nasional P1 yang tidak tuntas, juara 1 itu Jawa Tengah tersisa 1200 lebih, Pak. Kemudian, kami Lampung Selatan itu tersisa 470 dan kami adalah urutan pertama untuk provinsi Lampung, Bapak.

Jadi, kalau namanya perjuangan dari kami audien dengan anggota dewan, sudah. Kami audien dengan ke Disdik sudah juga, kami audien dengan lintas komisi pun Pak, bukan audien apa namanya? Pokoknya kita dari Komisi 1, 2, 3, 4 itu sudah, Pak. Tapi nyatanya, dengan jawaban keadaan keuangan Lampung Selatan, Pak. Bahkan, kami juga pernah menjalani audien lewat Menpan RB itu, kami lewat *video call conference* bersama apa namanya? BPKAD, Pak. Itu dijawab sama bp dari apa namanya? Menpan RB Menkeu itu katanya masih *zero growth*, nanti akan ada penyelesaian. Cuman kan jujur Pak, apa ya? Ya, kami terima loh Pak, bahwa akan adanya P1 itu hilang, tidak ada istilahnya kelebihan atau penuntasan P1 atau bagaimana. Bukan dari Lampung Selatan sih Pak, cuma kan di media sosial segala macamnya Itu loh, Pak.

Terus kemudian, kami juga takut karena ada di Menpan RB yang menyatakan bahwa honor itu akan terselesaikan di 2024 ini, di tanggal 5 Desember kan, Pak. *Nah*, itu yang benar-benar membuat kami harus "ayo sih jalan, mumpung kita libur". Kalau tidak libur, kan guru honor mau izin susah ya, Bapak. Jadi, mumpung libur, saya beranikan diri bersama kawan-kawan Lampung Selatan untuk ke sini.

Dan ini Pak, perlu Bapak ketahui bahwa kami ini hari ini juga ada yang menghadap ke Menpan RB, karena memang kebetulan kami diberi jalan akses ke sana oleh Bu Nunu, kami tadi pagi ketemu Bu Nunu, Prof. Nunu. Kemudian, kami bagi badan Pak, ada yang menemui Bapak di sini, ada yang kami ke Menpan RB, karena untuk me meminta kejelasan biar kami bisa bawa pulang ke Lampung Selatan.

Tapi, tanpa bantuan Bapak Para Anggota Dewan yang ada di sini, kami yakin kami bukan apa-apa, Bapak. Paling tidak Bapak turun, Bapak sidak, Bapak berikan pengertian bahwa dana anggaran DAU itu memang ada penggajian untuk kami P3K. Maaf sebelumnya Bapak, P1 untuk seluruh Indonesia apabila tidak tuntas bagaimana untuk menuntaskan P2, P3, ataupun guru honor yang sudah 5 tahun berturut-turut mengajar.

Jadi, mohon bantuannya selesaikan kami P1, kemudian susul dengan kawan-kawan pejuang guru honor. Bahkan, pejuang untuk menjadikan Indonesia ini Indonesia emas 2045, itu adalah ada di pundak kami, Pak. Terutama, kami guru SD Pak. Di mana guru SD itu menentukan bagaimana selanjutnya, guru SMP hanya meneruskan. Tapi, semua tanggung jawab itu ada di kami semua, guru SD, SMP, dan SMA.

Tolong Bapak, di sini yang sangat minim penuntasannya itu adalah guru kelas, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru agama, dan guru PJOK, dan satu lagi adalah guru bimbingan konseling.

Mohon bantuannya kepada Bapak, tolong tuntaskan kami P1 seluruh Indonesia khususnya untuk Lampung Selatan. Bapak turun ke daerah, tolong bantu kami untuk penyelesaian ini. Kemudian baru, saya yakin Indonesia pasti bisa. Bapak Para Anggota Dewan juga pasti bisa menyelesaikan ini. Di mana P1 selesai, saya yakin P2, P3 juga akan selesai. Di mana niat tulus Bapak itu untuk memajukan Indonesia emas 2022 45.

Terima kasih Bapak, saya akhiri.

*Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Waalaiikumsalam.

Ya, terima kasih, Bu.

Cukup ya? Kita lanjut.

GLPG LAMPUNG SELATAN, (ESRO YULI DAYANTI):

Cukup, Pak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya.

GLPG LAMPUNG SELATAN, (ESRO YULI DAYANTI):

Cukup.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya, cukup. Jangan lama-lama, Bu. Kalau lama-lama, jadi anggota DPR nanti. Ya, karena DPR itu "parle", parle emang kerjanya harus berbicara.

Kami lanjutkan kepada Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia. Dengan siapa ketua umumnya? Ibu Heti.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Baik, Pak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Diabsen dulu, *nggak?* Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya?

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Diabsen dulu, *nggak?* *Nggak* usah, ya?

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Oh ya sekalian. Bu Eti, Bu Nur, ada Bu Nur? Oh, Pak Nur.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Pak Nur, Pak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ade Setiawan? Oh ya. Fajar Aris? Ya. Lilis Maesaroh?

Mangga, Bu.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Baik. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Mohon izin *slide*-nya, Mas. Sambil berbicara.

Yang terhormat Pimpinan Rapat, Bapak Haji Ferdi,

Saya hari ini bertemu muka langsung Pak, biasanya saya podcast dengan Bapak.

Yang terhormat Bapak Anggota Dewan Komisi X beserta staf dan jajaran,

Oh iya, Bapak-Ibu. *Punten*, Ibu. Iya maaf, Ibu.

**Bapak-Ibu Anggota Komisi X dan staf beserta jajaran,
Bapak-Ibu teman-teman seperjuangan yang hadir hari ini,**

Perkenalkan, saya dari Forum FGHNLPSI. Saya kebagian terakhir Pak, karena memang ada musibah tadi ada truk terguling, tapi saya kena imbasnya ya macet berjam-jam. Iya, saya membawa anggota saya dari Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Sleman, Pak. *Next*, Mas.

Ini kali ke berapanya, saya mungkin tidak bisa menghitung lagi, Bapak Anggota Dewan. Membawa PR yang masih belum tuntas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Komisi X yang mungkin ini sudah tanggung jawab Bapak-Ibu Anggota Dewan untuk membantu kami, menyuarakan hak-hak kami. Kami di sini yakin, merasa semuanya tidak adil, Bapak-Ibu. Jadi, hari ini kami ada di sini. *Next*, Mas.

Saya sudah mendengar semua paparan teman-teman dari forum ke forum yang lain, bahkan di sini ada tiga atau empat forum yang menyuarakan P1 ya? Bapak-Ibu, terima kasih banyak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Oh ya Bu, ada kebetulan teman kami juga baru hadir, Bapak Nur Purnamasidi.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Dari.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Dari Fraksi Patai Golkar.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Ya.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Jadi, ini Dapilnya Jatim.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Jateng apa Jatim, Pak?

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Bukan, Jatim.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Oh, Jatim.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Jatim IV, Pak ya?

Baik. Lanjut, Bu.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Baik. Kebetulan ada dapilnya nih, Pak. Nanti ingin bercerita.

Jadi, saya sangat prihatin Pak dengan kondisi yang ada sekarang. Betul kata Pak Iman tadi, akhirnya timbul forum-forum yang sama-sama ingin berjuang, dari forum A, B, C, D. Bahkan, sekarang saya dengar lagi forum ada lagi, entah forum entah komunitas yang tidak terdata di BKN atau baru terdata di Dapodik, sama, ingin menuntut haknya menjadi ASN.

Saya tidak membatasi hal itu, Pak. Karena, memang kami sebagai warga negara Indonesia, kami lahir di negara tercinta ini, semuanya ingin sejahtera dan kami di sini atas nama guru semuanya Pak, di mana kalau P1 itu memang sudah sudah ada regulasinya dari awal, dari tahun 2021, Pak. Kami yang awalnya, mohon maaf Pak Ferdi, kami yang awalnya seorang guru ya, beberapa guru harus demo Pak, harus panas-panasan di luar itu. Ini saya juga kalau mengingat, *flashback* lagi itu sangat apa? Bergetar lagi, Pak. Nyatanya sampai sekarang Bu, masih belum selesai juga.

Jadi, kalau saya *alhamdulillah* sudah mendapatkan SK, Pak. Cuman saya terbebani Pak, karena P1 ini belum tuntas 100%. *Nah*, ini apa? Dasar hukum yang kami punya, yang kami, menurut kami, kami ingin supaya pemerintah itu nanti untuk tahun 2024 ini regulasinya tidak nge-*prank* lagi, Pak. Karena, P1 itu awalnya di-*prank*, Pak.

Kami, awalnya itu kami masuk, kalau kata-kata kiasnya, masuk ke jebakan Batman, Pak gitu. Yang harusnya sistem tidak bisa memasukkan kami ke sekolah yang ada guru induknya, akhirnya kami masuk ke situ dan akhirnya beda satu poin kami, guru induk itu bisa dapat penempatan. Kami yang nilainya tinggi, tidak. Begitu juga tahap dua, kalah lagi dengan yang Serdik. Dan tapi Pak, saya apresiasi juga buat pemerintah yang memang sekarang, *next* Mas.

Ingin menuntaskan honorer, saya apresiasi. Kemendikbud pun tidak semuanya tidak baik ya Bapak-Ibu. Saya apresiasi juga dengan komis dengan adanya Komisi X, Prof. Nunu sekarang sudah menjadi Ibu Dirjen gitu, karena dukungan dari Komisi X. Bukan PLT lagi, sehingga melahirkan regulasi-

regulasi yang menuntaskan, ya. Walaupun memang belum belum tuntas. Ingin P1 ini bagaimana? Yang tadi awalnya bahasa Inggris itu tidak bisa linear ke guru kelas, sekarang *alhamdulillah*, Pak. Walaupun dengan cara begitu pun masih belum tuntas juga.

Seharusnya kita bisa, bukan kita ya Pak, kalau saya sih hanya rakyat kecil Pak. Seharusnya, pemerintah itu bisa menarik "benang merahnya di mana sih?" Yang konon katanya rekrutmen ASN 2024 ini dibuka 2,3 juta formasi.

Saya, yang saya bicarakan di sini formasi guru Pak, karena kami di sini guru. Di sini dilihat ada 419, 419.146 formasi. Tapi faktanya, yang saya dapat infonya setelah Rakor itu, gurunya itu 170.649, ini saya baru dapat tadi pagi Pak infonya, jadi tidak ada di *slide*. 170.649 setelah hasil Rakor, itupun dibagi Pak, yang P3K itu cuman 150.031, CPNS-nya 20.618, ini setelah Rakor.

Jadi, sebenarnya apa masalahnya? Ternyata usulan dari pemdanya yang bermasalah. Kenapa pemda sampai tidak bisa percaya mengusulkan *nggak* maksimal? Apa masalahnya? Kalau saya punya, karena di forum saya itu ada beberapa daerah dari Sabang sampai Merauke Pak, ada yang P1-nya sudah tuntas, bahkan honorernya sudah banyak yang menjadi ASN.

Contohnya Lebak Pak, Provinsi Banten. Saya di sini kayaknya belum belum bisa ketemu langsung sama dapil saya Pak, titip salam aja Pak. Karena, saya WA juga jarang dibalas. Saya malah ketemu dengan anggota dewan dari Dapil-dapil lain, gitu. Lebak itu luar biasa, Pak. Kalau memang, boleh di *cross check* Pak, DAU Lebak itu berapa, di sana pun apa? PAD-nya berapa. Ini saya, *punten* Pak, saya itu guru tapi harus belajar lagi tentang kondisi-kondisi daerah. Sampai harus mencari informasi, karena kalau saya berbicara hanya apa? *Nggak* ada data, sepertinya saya nanti dibilang *nggak* ini, *nggak* baguslah, gitulah. Kenyataannya memang begitu, kita sampai mencari data-data seperti itu PAD, DAU, gitu. Yang awalnya sebenarnya tugas guru itu hanya mengajar ya Bapak-Ibu ya, sekarang harus jadi les privat, ya Pak Iman ya? Iya, gitu.

KEPALA BIDANG ADVOKASI GURU P2G (IMAN ZANATUL HAERI, S.Pd.):

Analisis.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Iya jadi, justru benar Pak Iman, kita analisa Pak. Kita analisa, apa sih sebenarnya masalahnya? *Next*, Mas.

Jadi, kenyataannya P3K yang sekarang itu hanya membuka 150.031 se-Indonesia Pak. Mohon di *cross check* lagi, mudah-mudahan ini datanya *nggak* benar ya. Saya berharap datanya tidak benar, jadi 400 seperti data yang awal. Semoga ini data saya tidak benar.

Nah, dari 2021 terus dari mulai hampir 200.000 P1, ini banyak korban Pak, yang awalnya forum P1 itu cuman satu, sekarang jadi banyak, itu. Yang

awalnya dulu hampir dibenturkan antara P1 negeri dan P1 swasta. Itu sesama guru aja Pak, bentur-benturan gitu. Kenapa sih? Kenapa sih negeri, kenapa sih swasta? Dan akhirnya sampai terjadilah PHK dari guru swasta.

Mungkin Bapak-Ibu sudah tidak aneh lagi kata PHK dari P1 swasta, itu *real*, Pak. Di Kabupaten saya, itu dua orang Pak sudah di PHK karena ketahuan ikut P3K. Kalau 2021, itu tidak ada regulasi atau apa itu? Yang ikut P3K tidak boleh, tidak ada. Kalau tahun 2023, itu harus ada menggunakan surat apa? Izin dari ketua yayasan, kalau *nggak* salah. *Nah*, itu sudah bagus lagi berarti kan, ada komunikasi dua belah pihak antara yayasan dengan pelamar.

Kalau 2021, kenapa jadi P1 korbannya, Pak? Di PHK. Teman saya itu dua Pak dan itu *nunggu* dari 2021, bayangkan Pak, Bu. Makanya, wajar tadi Bapak yang dari Tasikmalaya ada yang jualan kerupuk untuk menunggu status ASN, bayangkan Pak. Sekarang ada di forum saya umurnya sudah 57 Tahun, Bu. Ini saya juga nyinggung PP ASN, Pak. Kalau RPP ASN nanti lahir, saya titip, Pak. Bukan, bukan berarti "P3K banyak nuntutnya sih".

Ya, izin juga Pak, koreksi. Kalau anggota dewan, setelah 5 tahun terpilih, dapat pensiun, kita kontrak 5 tahun bahkan ada yang 1 tahun. Teman saya yang sudah di belakang sudah mendahului pensiun ya Pak, *punten*, sudah mendahului pensiun, tidak dapat tidak dapat apa-apa Pak, cuman ucapan terima kasih, gitu. Iya, kami modalnya 10 tahun Bu, 150.000 sebulan.

Iya, jadi gitu, Pak. Jadi, ada yang sudah 57 tahun yang sudah mendekati usia pensiun Pak, belum diangkat juga. Sudah di PHK dari ya apa? Sekolahnya. Saya kebayang Pak kalau hari ini, tahun ini, regulasi itu, kita ini masih, saya bilang masih, saya katakan regulasi masih abu-abu. Karena, belum ada yang bisa menyatakan P1 itu aman menjadi prioritas pertama dan tidak test. Saya belum belum belum menangkap itu.

Kalau tahun lalu, ada yang sudah berani menyatakan dari, mungkin dari pihak Kemendikbud, dari Kemenpan, bahwa P1 prioritas tahun ini. Tahun 2022 apa? P1 itu kalah dengan observasi Pak, dengan P3. Mungkin itu karpet karpet merah untuk P3 menurut saya, tahun 2022. Makanya, sekarang 2000 setelah 2023 itu sisa 14.070 guru P1, ini negeri dan swasta Pak. Boleh *next*, Mas.

Nah, di sini Pak. Ini juga saya datanya dapat cari-cari juga dari mbah Google, Pak. Dari 14.070 itu Pak, ini yang merah itu yang tidak masuk, Pak. Jadi, totalnya itu, kalau yang merah tidak masuk itu, ditotal sekitar 2000-an. Mungkin ini yang menjelaskan lebih bagusnya itu dari pihak Kemendikbud, karena kewenangan beliau. Saya hanya mencuri data saja, Pak. Bukan mencuri ya, mencari. Mencari data aja sebagai bahan pertimbangan. *Next*, Mas.

Nah di sini, dari 14.070 sisa P1 dari 2021 Pak, kalau berdasarkan data ini, 11.437 itu dapat formasi, 2.633 tidak mendapatkan formasi dengan, tadi ibu dari Lampung katanya juara. Juara kedua Bu?

GLPG LAMPUNG SELATAN (ESRO YULI DAYANTI):

Juara kedua.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Juara dua. Tapi *nggak* dapat ASN ya, Bu?

GLPG LAMPUNG SELATAN (ESRO YULI DAYANTI):

Nggak.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Nggak dapat SK juara keduanya. Harusnya juara itu dapat piala, tapi di sini juaranya malah.

GLPG LAMPUNG SELATAN (ESRO YULI DAYANTI):

Menunggu yang.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Menang, menang, menangis gitu, menangis, Bu ya? Jadi kalau, di sini ada Jawa Tengah itu juara juara menangisnya kesatu Pak, keduanya Lampung Selatan. Ini ada 30 daerah, Pak. Ini saya garis bawah kembali Pak, seandainya regulasinya nanti P1 menjadi prioritas. Kalau P1 tidak menjadi prioritas, yang sesuai dengan Undang-Undang ASN itu honorer dulu, ini jadi rebut-rebutan nih siapa duluan jadinya, Pak.

Ini *nggak* mungkin 2.633 lagi Pak, *nggak* tahu berapa. Akan lebih, saya pastikan akan lebih dari 2.633 lagi kalau regulasinya akan berubah tidak seperti tahun-tahun ke belakang. Ini yang kami khawatirkan, Pak.

Nah, di sisi lain Pak, ada P3K paruh waktu dan penuh waktu yang kemarin sudah mungkin kita dengar sama-sama di parlemen inilah dari Komisi II, Komisi X sudah menggaungkan ada dua P3K, P3K paruh waktu dan penuh waktu.

Saya juga titip Pak, sepertinya masalah kami yang kasus P1 itu harus jadi pembelajaran. 4 tahun Pak kalau dihitung dari angka tahunnya, 2021 sekarang 2024, 4 tahun masih belum selesai. Paruh waktu itu berapa ratus ribu orang, Pak? Yang akan mendapatkan itu nantinya. Teknisnya nanti, saya orang awam Pak, menurut saya *nggak* semudah membalikkan telapak tangan.

Yang konon katanya, yang saya dengar dari Kemenpan RB, yang P3 paruh waktu itu nanti pun akan mendapat NIP, NI P3K. NI P3K itu akan disertai apa? Katanya dapat gaji. Saya dapat info lagi Pak, semoga saya saya bilang info yang saya di sini kalau yang *nggak* bagus mudah-mudahan tidak benar

infonya, tidak valid. Teknisnya nanti Pak, P3K paruh waktu itu dibayar oleh keuangan daerah.

Saya dengar lagi, ini mudah-mudahan tidak benar ya Bapak-Ibu Anggota, untuk membayarnya itu, tunjangan PNS atau ASN itu akan dipotong. Jadi, menurut saya untuk menyelamatkan golongan ini, mengorbankan golongan yang satunya. Ini seperti apa ya? Gitu tuh. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Konon katanya hampir 70% dipotongnya Pak, untuk menyikapi P3K paruh waktu.

Sebenarnya ini usulannya gimana sih, Pak? Gitu. Saya kurang paham juga untuk penggajiannya. Saya bilang makanya tadi Pak, mohon dikaji kembali terkait isu atau apa ya? Bukan isu ya, P3K paruh waktu nanti ini. Kalaupun memang di sini Pak. *Next*, Mas.

Nah di sini Pak, isunya di sini Pak, kenapa teman-teman akhirnya ada di sini ya, mungkin yang P1. Kekawatirannya sangat kencang, Pak. Saya mohon, memang semuanya ingin jadi ASN P3 P3K Pak, ini euforianya luar biasa Pak. Luar biasa buat teman-teman honorer, itu sangat luar biasa.

Untuk daerah, yang saya tahu, itu tidak tidak dibuka untuk PNS-nya, berarti CPNS-nya itu di pusat ya, Pak. Yang awalnya pertama-tama, kita sih dapat informasi bahwa P3K dibuka setahun tiga kali, "wah senang banget nih teman-teman dapat info ini". Tapi saya, kalau saya, prediksi saya sepertinya *nggak* mungkin ya 3 tahun sekali, ternyata sekarang terbukti Pak, bukan 3 tahun sekali tapi ternyata dibagi. Yang pertama, itu adalah untuk sekolah kedinasan. Terus yang kedua, yang info saya dapat, itu nanti untuk kementerian. Yang ketiga, baru untuk daerah. *Nah*, seperti itu ternyata, saya pikir setahun tiga kali itu habis ini, ayo habis untuk menuntaskan nonASN ini, terus buka lagi, buka lagi sampai habis. Ternyata bukan seperti itu.

Nah di sini Pak, Jawa Tengah itu, saya contoh Jawa Tengah ya, memang *gambling* juga nih, usulan formasinya yang sudah teman-teman nih advokasinya luar biasa sampai ke daerah, ke BKPSDM, ke ah udahlah pokoknya sampai ke mana-mana Pak, itu 2.990, P1-nya ada 4.042. NonASN-nya itu, kita juga punya dapat *link* bocoran lagi, Pak.

Jadi, untuk mengetahui data nonASN di daerah kita berapa, itu kita bisa tahu, Pak. Saya juga *nggak* tahu ini teman-teman luar biasa banget, *nggak* tahu ada Bjorka, *nggak* tahu apa ini Pak, ada aja gitu. Jadi kita tahu nih Pak, daerah kita itu kebutuhan ASN-nya berapa sih? Itu sampai kita tahu, Pak. Terus, nonASN ada berapa sih? Itu datanya ada, Pak. *Nah*, di sini kalau formasinya 2.990, *nah* untuk P1 aja *nggak* tuntas Pak, non ASN juga *nggak* tuntas.

Nah di sini, mohon dipertimbangkan kembali, Pak. Di sini karena 4.042-nya ini adalah ada guru negeri dan swasta, itu. Jadi, kalau misalkan 2.990 ini nanti kalau regulasinya nomor satunya itu nonASN, ya itu yang tadi saya 2.600 itu pasti angkanya akan bertambah, bukan 2.600 lagi, gitu.

Saya sih berharap, seperti Prof. Nunu bilang waktu kita audiensi kalau *nggak* salah dengan P2G, itu sistem antrian lah. Oke, kalau sistem antrian, mudah-mudahan antriannya memang adil gitu. Yang nomor satu nomor satu, nomor dua nomor dua, nomor tiga, tapi tidak dengan cara ada yang dikorbankan dari sistem antrian itu.

Banten juga, Pak. Ini Banten juga sangat kencang. Awalnya, Banten tuh nol Pak, tahun lalu. Ya, Punten ini Banten. Kita tuh sampai demo Pak, mendobrak pintu DPRD waktu itu dan *alhamdulillah* *nggak* jebol Pak, geser doang. Geser Pak, kalau jebol itu merusak, merusak ini dong Pak apa, aset negara Pak nanti kita. *Nggak*, cuman digeser aja sih Pak, sebenarnya *nggak* dikunci pintunya.

Nah, itu akhirnya membuka 500 Pak, tahun kemarin. Itu kita apresiasi juga dan sekarang saya apresiasi kembali Pak, luar biasa Banten, 11.000 Pak 11.000. Itu dari guru, teknis, sama kesehatan. Dan gurunya itu kita pendekatan lagi, jadi memang advokasi Banten itu luar biasa Pak. Kita sudah, untuk selesainya kita belum tahu Bu, justru itu kita ke sini supaya regulasinya memang benar-benar adil, Pak.

Kalau Banten ini usulannya luar biasa Pak 6, 4.694, P1-nya 1.823. Ini kalau buat P1 jadi prioritas 1, selesai Pak *nggak* punya PR, *nggak* punya PR. Tapi, di sini nonASN-nya kita *nggak* tahu teknisnya seperti apa, kita sudah selalu koordinasi, komunikasi dengan Dindik dan BKPSDM-nya, seperti apa? Kita juga agak was-was juga sebenarnya, gitu. Tapi, semoga ini was-wasnya itu membuahkan hasil yang terbaiklah, gitu.

Jadi, kecemasan-kecemasan tuh seperti itu, Pak. Banyak banyak informasi yang kita dapat, karena memang regulasinya sampai sekarang belum terbit, Pak. Kita tanya “regulasinya seperti apa?”, masih tahap harmonisasi. *Nah*, mumpung masih tahap harmonisasi Pak, semoga nanti setelah ini ada Raker bersama Panselnas di Komisi X. Mohon kami-kami yang datang ini bisa dimasukkan aspirasinya, Pak. *Next*, Mas.

Nah ini Pak permasalahan, kalau tadi P1 yang belum tuntas, *nah* ini sudah tuntas, sudah dinyatakan lulus, ada aja Pak, masalahnya. Ya, tadi yang Pak Iman bilang kontraknya cuman 1 tahun, karena mengambil aturan minimal hanya 1 tahun.

Pak 1 tahun itu banknya *nggak* percaya, Pak. Ada yang mau mau benerin rumah, mau “sekolahin” SK-nya ternyata ditolak bank, Pak. Jadi, rumahnya masih aja gubuk Pak gitu, karena SK-nya cuman 1 tahun, gitu. Jadi, kalau 1 tahun itu menurut saya terlalu singkat ya Pak ya. Baru juga dibagi SK, melek lagi, udah habis kontraknya, perpanjang lagi, gitu. Makanya, itu benar kata Pak Iman tadi, memang ada yang 1 tahun dan itu ada di sebelah daerah saya Pak, itu hanya 1 tahun kontraknya.

Nah, ini Kabupaten Mimika Pak, ini juga miris Pak. Lulusnya bareng sama saya Pak, mudah-mudahan di sini ada dapilnya nih, Pak. Itu sampai sekarang Pak SK-nya belum dibagi Pak, belum bagi SK. Itu ada 488, dengan alasan seperti itu, apa? BKPSDM-nya belum menyerahkan ke Dindik.

Dan ini mirisnya, yang konon katanya tidak boleh merekrut honorer lagi, kenyataan di lapangannya itu masih ada, Pak. Masih ada sekolah-sekolah yang seperti itu. Makanya P1, “gimana saya mau ditempatin, Bu? Orang di sekolah itu sudah kemasukan guru honorer baru”. *Nah*, guru honorer barunya ini sudah masuk Dapodik, teriak lagi Pak, pengen minta dapat ASN. Wajar kalau menurut saya, karena memang semuanya juga ingin sejahtera di negara tercinta ini, itu Pak.

Yang kedua, penempatan ASN ini masih belum maksimal, yang sudah di itu juga sama Pak iman, menurut saya sudah sudah ter itu.

Yang ketiga juga, masih terdapat daerah yang tidak mendapatkan TPP atau Tukin. *Nah*, mungkin ini Pak yang tadi salah satunya contohnya tadi Lebak, itu saya sendiri pun tidak mendapatkan TPP Pak atau Tukin. Jadi, mungkin ini yang tadi Lampung Selatan ya Bu ya? Dan Jawa Tengah, sebenarnya gaji P3K itu sudah ada di PMK, kalau *nggak* salah Pak. Kalau Bapak sudah Raker dengan Kemenkeu, uangnya sudah di-ear.

UNDANGAN RAPAT:

Earmark.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Earmak ya, Pak? Kalau *nggak* salah, sudah ada. Mohon dikoreksi kalau saya salah Pak, sudah di Kemenkeu. Jadi kalau yang awal saya, setahu saya waktu setelah audensi dengan Kemenkeu, dulu itu sistemnya *reimburse* Pak. *Reimburse* itu berarti otomatis ditalangin dulu, makanya kenapa daerah itu *nggak* mau, *nggak* mau mengajukan dulu nih, karena uang keuangnya untuk nalangin gaji teman-teman P3K ini, *nggak* ada gitu. Itu, “oh seperti itu berarti memang kendalanya di situ”.

Tapi, sekarang Pak 2024 ini yang kemarin 2023 saya tanyakan kembali ke Kemenkeu, sistemnya bukan *reimburse* lagi, tapi melalui laporan rencana anggaran penggajian. Berarti kan, di sini dilaporkan dulu nih bulan depan yang akan, kalau ini sebagai saya orang awam ya Pak ya. Dilaporin dulu rencananya yang mau digaji berapa orang, baru ke Kemenkeu, baru besoknya bisa di ditransfer melalui DAU.

Menurut saya kalau begini, nih orang awam lagi Pak emak-emak lah ya Pak, kalau udah ada kocoran dari suami Pak, “nih uangnya segini nih, *sok* belanjain buat siapa”. Ini saya logika saya sebagai emak-emak Pak, “ini buat bayar ini mamang ojek, ini buat bayar anak les”. Kan sudah ada uangnya, sudah ada nih rencana anggaran yang saya ajukan ke suami saya. Otomatis

sudah *nggak* ada kendala dong harusnya untuk mengajukan formasi yang maksimal, gitu.

Lalu yang keempat, ini udah sering dibahas Pak. Kemarin juga saya di bawah komisi berapa itu ya? Nusantara berapa, itu saya diundang Pak dari parlemen untuk membicarakan honorer. Kok ini saya saya pikir sudah reda Pak. Wah, di media sosial itu Pak luar biasa Pak, seragam itu PNS dan P3K itu dibedakannya. Karena apa? Karena ada aturan.

Sebenarnya yang *nggak* ngikutin aturan juga *nggak* apa-apa, setahu saya, *nggak* dapat sanksi. Kenapa sih? Gitu tuh. Okelah kalau mungkin teknis tidak tidak langsung apa? Berhubungan dengan banyak orang, istilahnya *person to person* kalau yang teknis, tapi kalau misalkan guru, itu kan satu satu kelas atau satu sekolahan muridnya melihat pada saat upacara ternyata ada guru yang seragamnya berbeda. *Nah*, itu jadi pertanyaan juga. Jadi, ini kok masih begini terus? Gitu. Karena apa? Karena RPP ASN-nya belum keluar mungkin ya, Bapak-Ibu ya.

Makanya sekarang yang kelima ini, ya itu P3K itu masih dipandang sebelah mata. Karena memang ada kasta-kastanya lah katanya, kalau di sekolahan itu. *Next*, Mas. Yang terakhir Pak, mungkin ya Pak. Bapak-Ibu ini yang terakhir tuntutan kami Pak, dari forum kami.

Yang pertama itu, memohon agar status guru P1, baik guru negeri maupun swasta yang sisanya 14.070 orang ini tetap menjadi prioritas utama untuk dapat terakomodir dan diselesaikan seluruhnya pada rekrutmen tahun 2024 ini tanpa tes dan saya harap ini tertuang di regulasi Permenpan, ya Pak ya.

Yang keduanya, ini yang keduanya terkait tadi Pak, walaupun gaji itu sudah ada anggarannya di Kemenkeu, saya memohon. Kami Pak bukan saya, kami memohon nanti sebelum seleksi CASN itu biasanya ada Rakor Pak, mudah-mudahan tahun ini ada Rakor lagi mengenai juknis dan saya berharap sebelum nanti P3 apa? Seleksi P3K ini dibuka, pemerintah pusat baik Panselnas atau Kementerian yang lainnya dapat mendorong kembali untuk daerah yang mengajukan formasinya masih minim, Pak.

Ini ini terbukti, pengalaman ini terjadi pada Banten tahun lalu, Pak. Yang awalnya nol, setelah rakor itu dibuka kembali oleh Panselnas. Jadi, apa? Aturannya masih fleksibel lah, Pak. Kalau ditutup, *nggak* ditutup banget, gitu. Kalau memang sudah diberikan penjelasan dari pusat bahwa sebenarnya masih bisa bisa bisa bisa bisa, ya apa apalagi sih keraguan buat Pemda? Pemda itu buat apalagi? *Nggak* ada lagi deh menurut saya, keraguan itu.

Yang keempat eh yang ketiga, memohon disamakan dari segi kenaikan pangkat dan juga untuk jenjang karir antara P3K dan PNS. Karena, P3K itu memang sepertinya untuk jenjang karir agak agak susah ya Bapak-Ibu ya, dibanding PNS.

Yang keempat, pada masa transisi ASN, terkait ini yang sekarang isunya udah denger juga kemarin ada yang harus mengembalikan 75 juta itu Pak, *nah* ini di sini juga. Pada masa transisi ASN terkait munculnya Undang-Undang ASN, berakibat banyak P3K yang direkrut sudah berusia tua, yang tadi saya bilang, bahkan lebih dari 50 tahun. Untuk itu, mohon dipertimbangkan berdasarkan TMT Dapodik dan pertimbangan lainnya. Sekalipun pensiun di status Tenaga Ahli Muda, tetap bisa bertugas sampai 60 tahun dan berhak mendapat uang pensiun dengan formal formulasi apapun.

Yang kelima Pak, memohon agar menghapus kontrak P3K dan otomatis diperpanjang sesuai dengan usia masa pensiun. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan masukan dari Komisi X. *Next*, Mas. Dan bisa disampaikan dalam rapat kerja. Mudah-mudahan ada rapat kerja ya Pak, Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Dewan.

Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada dua lagi Pak, ini yang agak-agak *riweuh* juga.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Bu, sebelum diserahkan kalau ada tambahan, cuma harus yang berbeda.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Iya, Pak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ininya, apa? Masalahnya. Jangan sampai itu itu lagi kan.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Iya.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Sebenarnya kalau soal yang tadi, berputar-putar gitu.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Iya, Pak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Udah hafal saya.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Iya, Pak.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Jalid, jilid 1 sampai jilid 10, Pak Ferdi udah hafal.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Karena udah 4 tahun juga, Pak

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Nah, cuma kan artinya di sini jangan sampai nanti ada duplikasi penjelasan.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Siap.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Silakan.

KETUA FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (HETI KUSTRIANINGSIH, S.T.):

Ini agak-agak ini, ya Bu? Mau di itu *nggak*?

ANGGOTA RAPAT:

Dibilang aja Bu, *nggak* apa-apa.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ada spesifik, ya. Jadi, ada perbedaan. Jangan sampai semua sama semua, kan gitu. Kalau tidak ada spesifiknya, jangan. Kita cukupkan aja.

KOORDINATOR KABUPATEN SLEMAN FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (FAJAR ARIS, S.Pd.):

Baik, Bapak.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan Rapat dan segenap Ibu-Bapak Komisi X,

Langsung saja, ya. Jadi, mungkin sudah dijelaskan dan kita sudah tahu bukan rahasia bersama, bukan rahasia lagi bahwa intinya untuk, ternyata tidak hanya P1, tetapi juga ada guru-guru, forum guru yang lain juga seperti guru

honor juga. Karena, memang semuanya sudah ada undang-undang, sudah sudah ada aturannya, jadi memang kewajiban pemerintah untuk segera menuntaskannya.

Dan mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Fajar Ari Setiawan dari Kabupaten Sleman dan terima kasih banyak atas kesempatannya.

Kemudian juga, bukan rahasia lagi, tadi juga sudah disebutkan, bahwa ada beberapa Bapak-Ibu guru yang sudah diberhentikan karena status P3K, karena status P1-nya dan saya salah satunya. Makanya, ketika kemarin saya ada undangan dan Bu Eti menyampaikan kepada kami, kami merasa sulit. "Wah kalau tidak sampai ke Jakarta, rugi, karena ada kesempatan". Namun, kalau mau sampai ke sini saya bilang sama teman-teman, "duit dari mana?", sementara saya sudah tidak bekerja.

Saya 17 tahun jadi guru swasta, memang ya dan harus berhenti. Kalau harus berangkat ke sini juga kemarin berat juga, tapi *alhamdulillah* dengan koordinasi dari teman-teman, saya disokong dari teman-teman P1 Sleman juga. Dan ini saya juga berat juga Bapak-Ibu, nanti ketika saya pulang ke Sleman, kalau tidak ada hasil yang bagus, apakah saya harus mengembalikan iuran Bapak-Ibu? Jadi mohon sekali nanti untuk bisa betul-betul kembali lagi ditekankan.

Jadi untuk rincinya, untuk Kabupaten Sleman sendiri ada 180 P1 yang masih tersisa. Kemudian, kami sudah audiensi beberapa kali dan terakhir itu audiensi bersama Ibu Bupati yang kebetulan *alhamdulillah* memang kalau dari Pemkab Sleman sendiri, dari Dinas Pendidikan Kepegawaian dan Bupati itu, memang sangat komitmen sekali untuk mendorong tuntasnya P1 di Kabupaten Sleman. Namun, ada beberapa kendala yang membuat ternyata masih belum tuntas.

Yang pertama, menurut penjelasan dari kepegawaian Sleman, itu ada mapel *mandatory* yang wajib diberikan. Artinya, dari 180 format, 180 P1 yang masih ada itu. Tadinya 103, diberikan formasi 103, kemudian berkurang lagi karena ada mapel *mandatory*. Mapel *mandatory* itu, kata dari Bapak yang dari Kabupaten Sleman, itu wajib diberikan.

Kemudian yang kedua, dari Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa "kita tidak bisa memberikan formasi jika, karena ya, karena di dalam Dapodik formasi gurunya atau lowongan guru di sekolah itu tidak ada. Sebagai contoh, guru bahasa Inggris P1-nya ada 51, tetapi di aplikasi Dapodiknya itu yang kosong hanya ada tiga, maka tentu tidak bisa memberikan semuanya masuk di sekolah itu. *Nah*, itu permasalahan yang ada di Kabupaten Sleman. Maka dari audiensi tersebut, ibu bupati memberikan saran usulan.

Yang pertama adalah, seperti tadi juga sudah disampaikan ternyata mungkin sejalan juga, kita khususnya yang swasta mungkin tidak mau juga kalau menggeser dari yang honor negeri, maka kalau bisa memang dari swasta ya ditempatkan di swasta. Meskipun, mungkin sudah beberapa kali dibahas, katanya tidak bisa, tapi kan kita pengalaman ada di Indonesia. DPK itu kan

ditempatkan di swasta nyatanya bisa, tergantung mau atau tidak pemerintah. Kalau mau, ya ayo, kalau memang niat mau menuntaskan. Kalau tidak, ya maka akan selamanya menjadi permasalahan, itu.

Kemudian, usulan yang kedua dari bupati adalah dengan memberikan atau mengangkat P1 yang mungkin belum terangkat itu di mapel yang mungkin tidak linear, mungkin tidak sesuai dengan ijazahnya. Namun nanti ada kewajiban untuk melaksanakan kuliah atau pembelajaran sesuai dengan SK yang diberikan dan itu sekali lagi, sudah pernah dilakukan juga di Indonesia, seperti di K2. Kasus K2 dulu di Indonesia juga sudah pernah, maka kalau kita niat, saya rasa bisa, apapun masalahnya.

Jadi *monggo*, kami mohon sekali kepada Komisi X untuk bisa menuntaskan dan ini tadi ada dua hal ini. Kebetulan dari Bupati dari Pemkab Sleman juga sudah bersurat kepada Kemenpan RB, namun belum ada jawaban. Semoga nanti dengan adanya dorongan dari Komisi X, sudah ada jawaban yang baik. Begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, khusus rinci dari Kabupaten Sleman.

Terima kasih banyak dan terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Walaikumsalam.

Cukup ya? Jadi, saya biar cepat nih. Kepada Bapak-Ibu, mau ada menanggapi? Pak Zainudin? Mau?

UNDANGAN RAPAT:

Dari Jateng ada tambahan, Pak.

KOORDINATOR KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPSP PPPK GURU 2021 (LILIS MAESAROH, S.Pd.):

Pimpinan izin, saya belum.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Monggo, Monggo.

KOORDINATOR KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPSP PPPK GURU 2021 (LILIS MAESAROH, S.Pd.):

Nggih.

Assalamualakum.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Sakjane wis rampung, Mbak.

**KOORDINATOR KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPSI PPPK GURU
2021 (LILIS MAESAROH, S.Pd.):**

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Perkenalkan, saya Lilis Maesaroh dari Tulungagung. Terima kasih, kepada Bapak Pimpinan Komisi X, Bapak Haji Ferdi, sudah diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan keluh kesah kami, ya.

Jadi, kami menanyakan nasib kami. Kami mohon bantuan kepada perwakilan rakyat di pusat ini supaya bisa membantu kami, terutama nasib kami P1 yang dari daerah kami tidak membuka formasi sesuai jumlah sisa P1. Jadi, untuk tahun ini P1 tidak tuntas di daerah kami.

Jadi, kami sudah berulang kali audiensi ke dinas, ke BKD, ke Bapak Bupati. Juga, kami minta bantuan kepada wakil rakyat di daerah kami, tapi kami tidak mendapat kejelasan apapun. Akhirnya, kami nekat berangkat ke Jakarta, ke Kemendikbud. Ternyata, jawaban dari Kemendikbud itu adalah bahwa daerah kami tidak mau menerima kami yang statusnya adalah P1 swasta. Jadi, mereka hanya menerima P1 negeri saja. Jadi kami, di daerah kami, di anak tirikan, P1 swasta.

Jadi, kami mohon bantuan. Karena, kami bingung kami harus mengadu ke siapa lagi. Jadi, harapan kami, kami berangkat ke sini berharap dari Komisi X bisa membantu daerah kami. Karena, ternyata setelah kami dari Kemendikbud, itu sangat syok dengan jawaban ternyata daerah kami tidak mau menerima kami, P1 swasta. Akhirnya, dari Jakarta, dari Kemendikbud kami kembali ke daerah kami, setelah itu daerah kami, kami dipertemukan oleh seseorang dan seseorang itu beliau menjanjikan, bisa memberikan atau mengajukan formasi atas jalur eh lewat jalur itu *nggih* VIP, yaitu pakai uang.

Jadi, mohon eh mohon di *cross check* di daerah kami. Jadi, masih ada permainan seperti itu, pakai uang, terus titipan, orang dalam. Jadi, mohon *cross check* di daerah kami. Kemarin sempat disampaikan, di-*up* di sini oleh Bu Anisa ya tentang, tentang yang saya ceritakan ini.

Jadi, mohon bantuan. Karena, kami bingung mau ke mana lagi kami harus menyampaikan. Karena di daerah kami, ketika kami berjuang, itu ya itu tadi jawabannya intinya harus lewat itu tadi. Jadi, kami diminta untuk *menge-list* nama-nama yang siap diajukan untuk formasi. Jadi, ketika kalau *ndak* mau ikut di situ berarti tidak diajukan formasinya, seperti itu.

Jadi, mohon dengan sangat, jangan kebiasaan seperti ini dilanjutkan. Karena, di daerah kami ini sudah sangat mengakar sekali dan membudaya. Jadi, ibaratnya itu apa? Korupsi itu seperti minum air putih, ya.

Jadi, minum air putih itu tidak terasa, tapi itu sangat menyehatkan, menyegarkan. Jadi, tidak terasa, tapi buat nagih-nagih lagi.

Jadi, mohon bantuan dari Komisi, Komisi X mohon bantuannya untuk daerah kami di *cross check* kembali. Karena masih ada permainan seperti itu.

Ini dan kami mohon tidak dianaktirikan. Kenapa kami yang P1 swasta itu tidak diterima? Tadi saya dapat info dari teman, itu juga ternyata yang P1 dari Jatim itu, dari swasta, dia sudah menerima SK, tapi ternyata dia di sekolah yang sudah penempatan di SK-nya itu tidak menerima beliau. Beliau hanya boleh absen di depan sekolah, tidak diizinkan masuk, karena apa? Karena, karena di sekolah tersebut masih banyak honorer yang negeri. Jadi, beliau walaupun sudah mendapat SK, tapi beliau tidak bisa masuk ke dalam sekolah penempatan tersebut.

Jadi, mohon keadilannya jangan sampai kayak seperti saya ini, saya *ndak* punya orang dalam, saya *ndak* punya uang, saya hanya punya kompetensi. Saya sudah ikut tes dan saya lulus *passing grade*.

Jadi, mohon bantuannya yang praktik uang seperti itu masih berjalan, mohon di dibasmi, mohon diberantas. Karena, ya itu tadi, itu sangat mengakar dan kalau disebut oknum itu harusnya kan cuma satu dua, tapi kenapa kok ini oknumnya banyak sekali? Namanya bukan oknum lagi tapi ini sudah jaringan. Karena, untuk mengungkap ini sangat sulit sekali, tapi kenyataannya itu memang ada dan di daerah saya ini, apapun harus bayar. NUPTK bayar, masuk Dapodik bayar, honorer bayar.

Kami juga minta mohon tidak dianaktirikan karena kami swasta. Saya dulu pernah masuk sukuan. Jadi, di depan rumah saya itu SD negeri, saya masuk ke situ karena kompetensi yang saya miliki. Jadi, di situ memang membutuhkan operator dan guru bahasa Inggris. Di situ nama saya tidak di daftarkan, justru yang didaftarkan adalah anak kepala sekolah yang beliau tidak pernah hadir di situ.

Dia menuliskan apa? Absen itu, SK-nya dibuat mundur. Dia *ndak* pernah datang, tapi SK-nya dibuat mundur sejak tahun 2005, supaya apa? Bisa ikut eh itu kan tahun 2007, itu setelah, oh iya. Jadi, itu setelah ada pengangkatan besar-besaran ya yang saat itu apa namanya? Bukan, yang besar-besaran waktu zamannya Pak SBY, apa ya?

UNDANGAN RAPAT:

Nakes, nakes.

KOORDINATOR KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (LILIS MAESAROH, S.Pd.):

Iya, yang sekarang tersisa menjadi K2. Iya, jadi seperti itu.

Selanjutnya saya, di situ akhirnya nama saya *ndak ndak* dimasukkan. Akhirnya, saya pindah di sekolah negeri yang lain, juga sama, di situ saya masuk karena kompetensi, sama, anak kepala sekolah juga sama, hanya nama saja yang berada di situ. Akhirnya, saya tergeser dengan, di situ zaman dulu kalau mau masuk honorer itu harus dapat rekom dari kepala dinas yang terkait, jadi saya tergeser juga oleh rekom, yang mendapat rekom tersebut.

Jadi, mohon bantuannya. Kami ini rakyat kecil, kami sudah dilempar sana dilempar sini. Kami sudah mengikuti aturan pemerintah, tapi kami hanya di-PHP saja dan kami hanya menjadi korban dari kebijakan pemerintah selama ini. Dan kami perjuangkan, tapi malah ujung-ujungnya disuruh membayar. Padahal, kami tujuan mengikuti P3K ini adalah untuk mensejahterakan ekonomi kami.

Mungkin itu dari saya. Mohon bantuan benar-benar untuk di *cross check* ke daerah kami tentang yang saya ceritakan tadi. Bila ada salah, saya akhiri. Mohon maaf.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih.

Lanjut. Mohon maaf tadi Prof. Zainudin Maliki.

Sekalian kalau ada yang mau bicara langsung saja, karena tidak terasa sebenarnya kita sudah pertemuannya 2 jam 10 menit. Khusus untuk guru honorer.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.):

Iya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Pak Ferdi, Pimpinan Rapat RDPU hari ini,
Kawan-kawan Komisi X,
Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru honorer dan guru yang sudah berstatus P1
belum dapat formasi atau mungkin sudah dapat formasi tempatnya tidak
sesuai yang diinginkan,
Yang hadir semua,**

Terima kasih, dan kami apa namanya? Sudah mendengarkan dengan sepenuh perhatian dari mulai yang penyampaianya penuh dengan perasaan. Tidak hanya dengan perasaan, tapi dengan air mata. Dan kami sudah pernah menegaskan kepada Mas Menteri, pengangkatan P3K ini tolong dijadikan momentum pengangkatan guru honorer menjadi P3K, menjadi momentum

mengubah air mata menjadi mata air, gitu ya. Mengubah dari air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan.

Kita sudah memberi penegasan. Karena, mulai awal Mas Menteri Nadiem ini bertekad untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN. *Nah*, kami waktu itu menegaskan "itu langkah yang bagus, itu program yang bagus untuk mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan". Karena apa? Karena pemerintah itu berhutang budi sama guru honorer, itu.

Pemerintah belum bisa menyiapkan kekurangan guru sebanyak 1 juta sekian pada saat itu tahun 2021-2022. Siapa yang mengisi kekosongan? Yang mengisi kekosongan adalah guru-guru honorer. Itulah sebabnya kemudian saya membuat istilah pemerintah berhutang budi pada guru honorer dan oleh karena itu, ayo dibayar.

Nah, awalnya menekankan pada guru-guru yang lolos *passing grade*, karena apa namanya? Kompetensinya, tetapi kompetensinya terutama dilihat dari sisi pedagogis. Padahal, kompetensi tidak hanya diukur dari kompetensi pedagogis, tapi bisa juga kompetensi personal, kompetensi sosial.

Nah oleh karena itu, mestinya juga di harus di dihargai, jangan hanya nilai *passing grade* dari kompetensi pedagogisnya atau profesionalnya, tetapi juga dari sosial dan personalnya. Itu kalau dihargai, maka pengalaman itu harus dihargai. Kayak tadi sampai menangis-nangis sudah 14 tahun keluar masuk hutan, 1 jam harus naik sepeda motor, beli apa namanya? Bannya sampai, ya itu itu kan karena *passion toh*? Bayarannya untuk beli ban saja kan susah itu. Kalau bukan karena *passion*, saya kira sudah berhenti jadi guru itu. Oleh karena itu, *passion* juga harus dihargai.

Dan pendidik yang baik itu adalah pendidik atau guru yang punya *passion*, bukan hanya punya pengetahuan. Punya pengetahuan *ndak* punya *passion* itu, menurutnya hemat saya, tidak akan berhasil mendidik anak-anak didik kita. Mendidik harus disertai dengan *passion*, catatan yang pertama itu.

Jadi, intinya kita sudah mendesak supaya Kemendikbud berusaha mengangkat kalau bisa sampai 1 juta dan sampai hari ini sekitar 640 yang sudah yang sudah terangkat. Dan mungkin 640 itu walaupun ada masalah-masalah sedikit-dikit; penempatan dan lain-lain, yang sebagian juga ada yang tidak manusiawi penempatannya, yang kemudian menggeser guru-guru negeri, yang dari swasta juga merasa kehilangan guru seniornya, tetapi sudah terangkat.

Nah, tahun ini ada angka lagi yang ingin di diusulkan, kekurangan 419.000 sekian untuk diangkat. Tetapi sekali lagi, hambatan yang dihadapi oleh Kemdikbud adalah formasi. Formasi lebih banyak ditentukan oleh daerah, tapi ternyata saya mendengarkan dari apa yang disampaikan ini, daerah juga mempunyai beberapa alasan kenapa tidak bisa memberikan formasi.

Yang pertama yang saya dengar tadi, karena ada mapel *mandatory* yang harus dipenuhi, dari Sleman ya? Sehingga kemudian, guru yang kompetensinya di luar *mandatory*, kemudian meskipun sudah P1, tidak dapat formasi, betul?

Kemudian yang Tulungagung alasannya apa itu alasannya? Tulungagung yang diterima hanya dari honorer yang negeri saja, yang swasta tidak. Ini Tulungagung. Tulungagung mana itu? Bu Maesaroh.

ANGGOTA RAPAT:

Daerah mana, Ibu?

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.):

Tulungagung mana, Bu?

KOORDINATOR KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (LILIS MAESAROH, S.Pd.):

Saya?

ANGGOTA RAPAT:

Bapak itu.

KOORDINATOR KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (LILIS MAESAROH, S.Pd.):

Oalah.

ANGGOTA RAPAT:

Nyariin orang.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.):

Sampean itu lagi WA-an, *toh*?

ANGGOTA RAPAT:

Nyari orang. Tulungagungnya di mana, Ibu?

KOORDINATOR KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPSI PPPK GURU 2021 (LILIS MAESAROH, S.Pd.):

Saya, Pak? Iya.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.):

He'eh.

**KOORDINATOR KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPsi PPPK GURU
2021 (LILIS MAESAROH, S.Pd.):**

Saya menyampaikan ini.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.):

Nggak, Tulungagung mana?

ANGGOTA RAPAT:

Tulungagungnya di mana?

**KOORDINATOR KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPsi PPPK GURU
2021 (LILIS MAESAROH, S.Pd.):**

Oh, di Karangrejo.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.):

Karangrejo. Rumahku itu Rejotangan, kamu tahu?

**KOORDINATOR KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPsi PPPK GURU
2021 (LILIS MAESAROH, S.Pd.):**

Iya tahu, Pak.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.):

Oh tahu, ya sudah.

**KOORDINATOR KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPsi PPPK GURU
2021 (LILIS MAESAROH, S.Pd.):**

Iya.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.):

Nah.

**KORD. KABUPATEN TULUNGAGUNG FGHNLPsi PPPK GURU 2021 (LILIS
MAESAROH, S.Pd.):**

Jadi.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.):

Itu alasan-alasan daerah untuk tidak memberi formasi.

Nah, saya kira memang ini nanti akan menjadi bahan kami untuk melakukan koordinasi atau mendorong kepada Kemendikbud melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan daerah. Sehingga, kemudian tidak ada alasan karena *mandatory*, tidak ada alasan karena mendiskriminasi honorer swasta.

Nah, itu itu nanti kita akan jadikan bahan untuk supaya ini diselesaikan dengan baik oleh Kemendikbud.

Nah, kalau kemudian soal harus ini bayar, itu bayar, laporkan aja kepada yang berwajib, gitu ya. Kalau pungutan-pungutan liar itu masih apa namanya? Dilakukan. Itu ada yang pihak yang berwenang, laporkan aja itu.

Kemudian, GPAI. GPAI ini, kami juga heran juga ya, Kementerian Agama itu mendapatkan alokasi anggaran berapa itu?

ANGGOTA RAPAT:

Enam puluh sembilan.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDIN MALIKI, M.Si.):

5%, 5% dari 20% *mandatory* dari APBN. itu angkanya 30, 30 oh 9%? Kementerian Agama 9% bukan 5% *sorry*. Kementerian Agama 9% angkanya 62 triliun. Sementara, Kemendikbud selisihnya tidak terlalu jauh dari yang dikelola oleh Kementerian Agama, 13% angkanya 95 triliun 98,1. Jadi, 62 dengan 98. Saya heran dengan angka sebesar itu Kementerian Agama tidak bisa memberikan PPG dan harus suruh bayar sendiri kalau mau, gitu ya?

Ini saya kira, tapi Kementerian Agama bukan mitranya Komisi X. *Nah* gini, saya kira memang secara personal, secara pribadi saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional mungkin bisa bisikin teman saya yang di Komisi VIII, "ini apa masalahnya? Kok *ndak* bisa memberikan kesempatan guru-guru GPAI kita untuk melakukan PPG, tidak seperti yang diperoleh oleh teman-teman guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek". Ini saya kira juga nanti akan menjadi bahan koordinasi kami.

Jadi, Bapak-Ibu sekalian, Komisi X itu tadi sudah sampaikan oleh Pak Ferdi, lebih dari hari 40 kalilah kita ini berbicara khusus berkaitan dengan guru honorer dan pengangkatan P3K.

Kita terus mendorong agar Kemendikbud mencapai targetnya, tapi rupanya sampai akhir periode jabatan, apa namanya ini? Sampai ke pemerintahan yang sekarang berakhir, itu kayaknya target 1 juta guru honorer diangkat menjadi ASN P3, memang kayaknya belum terpenuhi, ya. Tetapi, 600 okelah kita apresiasi dengan segala macam suka dukanya dan sisa

masalah yang ini akan menjadi komitmen Komisi X, tetap. Agar kemudian permasalahan yang cukup apa ini menurut saya ya? Ribet dan pelik ini bisa kita selesaikan dengan baik.

Sekali lagi kita akan minta Kemendikbudristek berjuang lebih keras lagi agar air mata kesedihan berubah menjadi air mata kebahagiaan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

UNDANGAN RAPAT:

Mohon izin, Pak Dewan. Mohon izin, boleh saya masuk?

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Saya atur dulu. Kesempatan kalian sudah dikasih waktu, teman saya belum, baru satu.

Bu Lisda, mau bicara?

F-NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Siap. Makasih, Pak Ferdi.

Bismillahirrahmanirrahim,

**Yang saya hormati Pimpinan Rapat,
Kemudian beserta teman-teman Komisi X,
Yang saya hormati Bapak-Ibu,
Yang saya banggakan dari asosiasi dan forum, baik itu guru PAI dan juga guru-guru yang lain ya, yang baik honorer,**

Saya terlalu banyak istilah-istilah ini jadinya bingung, ya. Senang sekali saya dapat bertemu dengan Bapak-Ibu semua ya, pejuang-pejuang di dunia pendidikan ya, orang-orang yang sangat berjasa terhadap bangsa dan negara. Namun, hak-haknya masih masih sangat-sangat terabaikan, gitu. Tapi, mungkin Bapak-Ibu kenal Pak Ferdi yang sebagian bagaimana beliau juga berjuang untuk ini, begitu juga kami di Komisi X.

Jadi, apa? Curhatan Bapak-Ibu tadi yang disampaikan, masing-masing punya permasalahan masing-masing ya dari tiap daerah atau secara keseluruhan, ini sebenarnya kami sudah mendengar juga sebelum-sebelumnya. Walaupun, mungkin ada lagi yang baru nih, yang VIP ya, ternyata harus ada uang, *nggak* tahu di daerah lain apakah juga seperti itu.

Nah, ini beda-beda ya? Daerah lain *nggak* pakai uang kok. Tapi, di daerah Ibu, kalau mau masuk ke dalam daftar orang-orang yang akan mengikuti test tersebut, ternyata harus pakai uang. *Nah*, ini ini kan *nggak* betul ya, karena seharusnya memang tidak ada biaya-biaya seperti itu.

Jadi, kalau kita lihat dari carut marut di dunia pendidikan ini ya, Bapak-Ibu, mulai dari kekurangan sekolah, sarana prasarana, kompetensi guru. Mungkin Bapak-Ibu sendiri merasakan, pernah *nggak* sih mengikuti pelatihan-pelatihan? Ya kan? Dan apakah komplis latihannya? Ada kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, sosial. Sudah pernah belum mengikuti pelatihan itu semua? Ya.

Jangankan, maaf, yang honorer, yang ASN aja belum. Bagaimana kita bicara mau mendapatkan putra-putri bangsa yang berkualitas kalau gurunya sendiri tidak dibekali? Belum lagi ditambah guru masih mikir nih ban bocor, ganti ban, ya kan? Besok makan apa? Bagaimana kita ini mau betul-betul fokus mendidik anak bangsa?

Kalau kita melihat di luar sana, Bapak-Ibu ya, dari TK itu mereka yang mengajar profesor-profesor, orang-orang yang sudah punya keahlian-keahlian, lengkap, gitu. Dibalik deh ya. Kalau kita *nggak*. Saya sekarang mau tanya ya, honorer ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang memang sudah dari pendidikan guru semua? Semua, 100%? Ya jadi bukan, maaf ya, mungkin dari mana, pendidikannya apa, kemudian ya daripada nganggur kemudian jadi honorer di sini, ada *nggak* yang seperti itu? Gitu, ya. Tidak ada ya? Oke, baik. Itu sudah *alhamdulillah* bagus.

Cuma yang saya mau, sempat juga saya sampaikan kepada apa? Pada kesempatan pertemuan seperti ini, sebenarnya kita itu penerimaan ASN itu mau jalurnya itu dari mana, gitu? Apakah melalui honorer dulu, kemudian menjadi P3K, kemudian menjadi ASN? Ataukah honorer lanjut ke ASN? Ataukah masuk, kemudian di test, mungkin apa namanya? Kayak magang dulu berapa tahun, kemudian langsung jadi ASN? Atau seperti apa, gitu?

Karena, pengalaman saya, dulu saya pegawai BUMN Bu, saya pramugari. Jadi, pada saat masuk, itu tuh kita dites apakah kita pantas, layak untuk menjadi pramugari atau tidak. Ada delapan test, ya psikotesnya, penampilan, bahasa Inggrisnya, pengetahuan umum, dan lain-lain, ya. Delapan kali tes itu, kemudian baru setelah oke, ya kan? Ditest dari misalnya 1000 orang, saya waktu itu 6 orang yang gol sampai ke Jakarta, Pantukhir. Enam orang inilah yang melanjutkan masuk, waktu itu saya di PT Garuda Indonesia.

Kemudian, di sana saya masuknya sebagai apa namanya? Karyawan yang belum tetap, ya? Apa honorer atau apa namanya, selama 2 tahun. Tapi, jelas gitu loh. Jadi, kalau misalnya masuk sebagai honorer 2 tahun, anggaplah seperti magang dulu, kita harus menambah ilmu. Tapi di situ, begitu 3 bulan kami mulai praktik dan lain-lain, di situ mulai penambahan. Ditambah bahasa Inggrisnya, ditambah bahasa Jermannya, ditambah segala macam sehingga dalam waktu 2 tahun dia sudah menjadi seorang yang profesional, siap lagi ke

dunia internasional, seperti itu. Baru kemudian berkarir menjadi pegawai tetap, begitu.

Nah, kan harusnya begitu jenjangnya, Bu ya? Kalau kita ini *nggak*, kan? Ada yang honor dulu, ada yang *nggak* pakai honor langsung masuk, ada yang honor sudah 30 tahun *nggak* diangkat-angkat, ada yang baru masuk sudah diangkat. Pusing gitu, ya Bu ya?

Saya bisa merasakan sekali apa yang Bapak-Ibu rasakan. Tapi, kami punya tanggung jawab di Komisi X ini untuk terus berjuang. Kita punya waktu mungkin tidak lama untuk periode yang sekarang. Tapi, *alhamdulillah* mungkin kita semua di sini, yang hadir ini *insyaallah* melanjutkan lagi di periode berikut, sehingga masih terus bisa melanjutkan dan ya semoga juga masih tetap di Komisi X.

Kalau Pak Ferdi sudah menjadi penghuni tetap soalnya, sudah ke-6 periode beliau di Komisi X, ya. Jadi, semoga ya perjuangan berikutnya ini kita benar-benarlah. Kami sekarang sedang ada menjadi Panja Biaya Pendidikan. dan di situ, saya di sini baru 1 tahun lebih Bapak-Ibu, sehingga saya ya baru tahu "oh ternyata begitu dibuka ya satu-satu, waduh luar biasa carut marutnya". Ya, sehingga dengan apa yang kami temukan di Panja Biaya Pendidikan tersebut ya, kenapa biaya sudah sebesar itu tapi kok tidak mencukupi jumlah sekolah, kualitas guru, sarana prasarana, honorer, pengangkatan dan lain-lain ya.

Nah, di sinilah kita, dengan kehadiran Bapak-Ibu semua, itu menambah. Menambah apa yang sekarang, menjadi kami rangkum untuk menjadi satu perjuangan, *insyaallah*, ke depan yang lebih baik, seperti itu.

Jadi, saya berharap semua terus kita berikhtiar, ya. Terus berikhtiar jalur langit juga ditingkatkan, sama-sama. Kami di sini, jangan khawatir kami pasti akan terus, ya. Apalagi nanti sebagian kan ada komunikasi dengan Pak Ferdi yang bisa secara intens bisa di, terus diingatkan. Tapi, kami melalui Panja pun, satu-satu permasalahan ini harus kita tuntaskan dan kita berharap dengan waktu yang mungkin cuma dua bulanan lagi dari sekarang, tapi jangan putus asa untuk kita teruskan pada periode berikutnya.

Dan semoga ya kita bisa, saya *nggak* tahu menterinya mungkin ganti ya. Tentu kita berharap menteri yang baru akan bisa lebih bisa memahami apa yang seharusnya dilakukan untuk dunia pendidikan dari segala hal tadi itu, ya. Karena, Bapak-Ibu di sini, saya senang juga masih bisa senyum gitu, ya. Saya pusing kali Bu kalau digaji 300.000 sebulan, saya sudah *nggak* bisa senyum, Bu. Iya, ya luar biasa. *Insyaallah* itu akan menjadi amal jariyah untuk Bapak-Ibu semua dan terus kita berjuang ya bersama-sama

Salam hormat, salam sayang buat keluarga kita, teman-teman yang lain yang tidak hadir pada saat ini. *Insyaallah* apa yang kita perjuangkan bersama ini akan mendapatkan hasil, bukan hanya untuk Bapak-Ibu yang hadir di sini, tapi untuk seluruh bapak-ibu guru yang juga mengalami nasib yang sama seperti Bapak-Ibu di sini.

Terima kasih, banyak maaf.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya, sebentar. Pak Nur, silakan. Habis ini nanti kalau ada yang mau menambahkan, silakan dari temen-temen tamu.

F-GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Ya, terima kasih.

**Pak Ferdi,
Teman-teman Komisi X yang saya hormati,
Sahabat-sahabat para tenaga pendidik yang saya hormati,**

Kepala saya mendadak pusing. Jadi, udah dengerin guru ini pusing ini. Yah karena memang dulu saya terjebak di urusan hilirnya, *nggak* selesai-selesai. Jadi, sekarang saya fokus di urusan hulunya, karena ternyata hulunya ini yang menurut saya harus kita selesaikan.

Jadi, ketika daerah mulai bersemangat mengalokasikan anggaran untuk menambah formasi, ada aturan baru *nggak* boleh belanja pegawai lebih dari 30%. *Nah*, sudah semangat nih. Gubernur, bupati, walikota sudah semangat, sudah terprovokasilah dengan perjuangan kita semua ini tiba-tiba kemudian itu.

Jadi, begitu juga dulu ketika daerah kepingin dilibatkan agar proses pengadministrasian itu dilibatkan. Yang terjadi tadi, laporan dari Tulungagung itu. Karena mereka merasa mengadministrasi, akhirnya kemudian mereka merasa bisa membantu.

Nah, sekarang untungya Prof. Nunu sudah paham, akhirnya ditarik lagi, *nggak* *nggak* dikasih ruang lagi daerah untuk mengadministrasikan. *Nah*, ini problem hulu semua. Karena itu, kami barusan bersama dengan Kemenkeu di Banggar, di Laporan Panja Kebijakan Transfer Ke Daerah, kita sudah menyampaikan, "kebijakan DAU itu harus melibatkan Kemenpan RB dan BKN untuk mengetahui perlu tidaknya tambahan DAU untuk mendukung pengangkatan ASN termasuk P3K".

Nah, ini barusan kita putus tadi dengan Kemenkeu. Karena karena tadi katanya Prof. Zainul Maliki, kita doakan beliau jadi menteri lah karena koalisi dengan Pak Prabowo ini. Potongan sudah, kacamata sudah, tinggal tukang jahitnya yang belum, ya.

Jadi, ini problem hulunya kita ingin selesaikan. Termasuk, kami baru tahu ternyata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 600 triliun. Padahal PP-nya ada, PP 18 Tahun 2022.

Setiap kali mau membuat aturan teknisnya, diveto oleh Kementerian Keuangan dan ini kemudian saya minta tolong BPK RI dan sudah ada hasilnya. Hasil audit kinerjanya adalah meminta Kemenkeu membantu Kemendikbud untuk menyelesaikan mengeluarkan undang-undang aturan teknisnya. Ini sudah, saya akhirnya ke teman saya auditor Eselon 1 di BPK RI untuk membuat audit dan sudah dilakukan audit kinerja. *Nah*, sehingga sekarang Menteri Pendidikan punya *standing* untuk meminta agar 665 triliun itu memang untuk kepentingan pendidikan. Makanya, kemudian kami tangkap di Komisi X, kita buat namanya Panja Pembiayaan Pendidikan.

Nah, ini ini hal yang kami lakukan dari beberapa yang sudah menjadi problem kita semuanya, karena apa? Karena memang kenapa belarut-larut.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Kalau saya merasa memang menteri kita, Pak Nadiem Anwar Makarim, tidak sehat sama kita. Makanya, saya sudah bilang, "jadilah orang tua yang baik, Mas Menteri. Jadilah jadilah sebagai orang tua yang tetap mengaku anak-anaknya". Tapi, mas menteri kita tidak menjadi orang tua yang baik. Karena itu, memang boleh kita *statement* di sini, Prof. Nunu sendirian, berjuang bersama kita semuanya.

Makanya saya kalau ketika ketemu Prof. Nunu, "yang sabar Prof, ayo kita berjuang bareng-bareng". Dan menurut saya, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, secara perlahan sudah mulai ada jalan untuk ke arah sana. Makanya, kami secara politik, sampai hari ini, belum mengizinkan, belum setuju adanya pembukaan ASN baru guru P3K sampai ini selesai dulu.

Nah, ini belum ada. Jadi, ini sudah ada keputusan, ya itu sudah kita putuskan di sini. Jadi, kalau dia mau mengangkat P3K guru yang baru, maka harus lapor dulu ke ke Komisi X. Kami belum merubah keputusan itu.

Nah jadi, mudah-mudahan Panja Pembiayaan Pendidikan selesai di bulan September sebelum periode yang akan datang, sehingga kita masih punya waktu kurang lebih 3 bulan untuk menyelesaikan sesuai dengan janji kita semuanya. Saya pikir itu, Pimpinan.

Jadi meng-*highlight* apa yang sudah disampaikan teman-teman sekaligus *standing* perjuangan kita bersama. Memang saya dan teman-teman mulai mencoba untuk di hulunya, karena semua ini hulunya, kan gitu. Karena, ini kan kemarin ini kesimpulan kami, kebijakan 1 juta ASN P3K guru itu sangat politis, belum disiapkan administrasinya, belum disiapkan kerja sama antar K/L-nya. Di tengah perjalanan baru terjadi.

Seperti tadi misalnya, perjanjiannya awal angkatan pertama, angkatan kedua hanya negeri saja yang boleh daftar. Ternyata mulai angkatan pertama, swasta boleh, sudah boleh mendaftar. Ini di luar kesepakatan, gitu. Walaupun mas menteri menyatakan, "ya kita *nggak* bisa, ini hak semua orang". Oke, itu *nggak* ada masalah. Cuma kan akhirnya teman-teman merasa diadu. Tadi

misalnya, yang yang diangkat yang negeri saja, yang swasta *nggak* diangkat, ini kan seperti diadu, gitu loh.

Nah, ini ini semua kita kita catat, kemudian kita kita selalu mencari jalan untuk bagaimana menyelesaikan semua ini dan mudah-mudahan 2024 ini, sebagaimana catatan-catatan kita semua selama ini, kita bisa menyelesaikan sisa persoalan yang yang ada. Sehingga kemudian, semuanya bisa kita apa? Kita berikan kepastian secara hukum secara administratif, termasuk juga hak-haknya. Karena, memang selama ini daerah merasa, ya. Apalagi kemarin kita dapat dari Kemendagri ada 60% dari anggaran pendidikan itu kalimatnya untuk apa, Pak Pak? Untuk.

ANGGOTA RAPAT:

Banggar.

F-GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Yang diperkirakan.

Ah kalimatnya begitu, “diperkirakan”, kan luar biasa ini. Ya, “kira-kiranya kepala daerah”, kira-kira apa? Kan *nggak* tahu kita. Jangan-jangan, apa? Beli pohon itu diperkirakan untuk pendidikan, kan gitu. *Nah*, ini juga kita selesaikan. Jadi, hulunya kita selesaikan semua satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan, menjawab problem baik secara administratif maupun secara anggaran.

Begitu, Pimpinan. Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M./KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Ini Pak Nur Purnomosidi kayak kepala sekolah. Jadi, kita kasih tugas tambahan di Banggar, mengawal tentang diantaranya menyelesaikan juga soal yang tadi P1 dan penyelesaian penyelesaian seperti itu yang berkaitan dengan anggaran, termasuk DAU.

Terima kasih Pak Nur, dan terima kasih Pak Zainudin Maliki, dan Ibu Lisda.

Tadi yang mau ngacung, tapi di luar konteks ini? Kalau *nggak* di luar konteks ini, aduh artinya, yang sudah jangan diulang-ulang. Ya, silakan kalau ada.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Pimpinan sebentar interupsi.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Saya mohon izin ada keperluan sebentar.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya, silakan.

Jadi artinya, tolong Pak ya jangan diulang-ulang lagi Pak. Yang yang di luar, yang sudah disampaikan oleh teman-teman jangan diulang lagi karena kita sudah catat semua, Pak.

UNDANGAN RAPAT:

Tidak Pak, tadi yang.

UNDANGAN RAPAT:

Siapa dulu, Pak? Siapa dulu?

UNDANGAN RAPAT:

Silakan silakan, *mangga mangga*.

UNDANGAN RAPAT:

Pak mungkin tadi, saya rasa mungkin tadi cukup dari saya. Khususnya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Nur, soalnya tadi itu banyak banget yang meng-*highlight* permasalahan-permasalahan di Tulungagung dan GPAll. Tapi, lupa tidak meng-*highlight* permasalahan di Jawa Barat, seperti itu. Mengenai dana APBD. Makanya, tadi ketika Pak Nur sudah menjawab, saya merasa tenang saya, merasa lega dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tapi Pak sedikit, saya ada teman saya yang ingin.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Bilang dulu coba, "*hatur nuhun*, Pak Nur Purnamasidi", gitu.

UNDANGAN RAPAT:

Hatur nuhun, Pak Nur udah ingat pada permasalahan Jawa Barat. Dan harapan saya juga Pak Nur, tolong sedikit di, kembali dilihat kembali untuk permasalahan tentang APBD di Jawa Barat, seperti yang Pak Nur barusan lakukan. Kemudian, sedikit dari teman saya ingin menambahkan untuk Pak Pak Ikna. *Mangga*.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya silakan, Pak.

SEKRETARIS DEWAN PEMBINA AGPAII (Dr. DARURI, S.Ag., M.Pd.I.):

Iya.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Pak Haji Ferdi. Nama saya Daruri, jabatan di AGPAII sekretaris dewan pembina DP AGPAII kalau jabatan sehari-hari, pengawas PAI, Pak.

Ini semua bicara tentang guru, itu. Tapi, kami dari nunggu-nunggu nih tentang pengawas bagaimana nih, sama nasibnya. Terutama pengawas PAI, begitu maksudnya.

Jadi begini, Pak Haji Ferdi. Kami ingin, tadi ketika menyatakan bahwa "ini PAI itu di Komisi VIII, Kementerian Agama", tapi kenapa kita juga diterima di Komisi X? Karena memang pendidikan. Tetapi, karena PAI itu oleh dua Kementerian, ini yang mengakibatkan, dalam tanda kutip, katanya punya juragan dua mestinya lebih wah gitu, tapi kenyataannya sering diombang-ambing. Kata Kemendikbud atau Dinas, "itu di Kemenag", kata Kemenag "itu di Dinas, di Pemda", banyak sekali masalahnya, rumit dan memang salah satunya diregulasi.

Kalau di Kurikulum Merdeka, kalau ada difereben diferensiasi itu, mestinya berkaitan dengan PAI, mestinya Pak. Kami itu kalau dengar pendapat begini bisa nyambung sebetulnya, harus dengan Komisi X, Komisi VIII, dan Menpan RB.

Selama ini, belum terjadi. Bahkan, kami sudah beberapa kali tiap tahun ngusulin untuk Komisi VIII, karena unek-unek kami, PAI, itu banyak sekali di situ, belum sampai hari ini. Mudah-mudahan setelah dari Komisi X, Komisi VIII bisa menerima kami, khususnya PAI. Karena ini ada khusus, mata pelajaran PAI yang nomor 1, *mandatory* negara, tetapi kemudian perlakuannya perlakuan terhadap guru PAI itu berbeda, tadi disampaikan.

Kami pengawas PAI sedang resah juga, Pak Haji Ferdi, dengan aturan yang baru, PermenpanRB Nomor 1 2023 tentang Jabatan Fungsional, kemudian Perdirjen 4831 tentang Penguatan Peran Pengawas Sekolah.

Jadi, sudah tidak ada lagi namanya pengawas mapel, Pak Haji Ferdi. Sementara, kami masih pengawas mapel. Ditarik ke Kementerian Agama, belum, tapi ketika mau ke sekolah kami bingung tugasnya. Karena, sekarang dengan transformasi kepengawasan itu, fungsinya bukan lagi pengendali, menjadi pendampingan. Kami mendamping, harus mendampingi kepala sekolah di bidang apa? Kalau hanya PAI saja, agak tanda kutip Pak ya, jadi ini tidak tidak holistik, begitu.

Sehingga, mestinya kalau seperti ini, mohon maaf, Kementerian Agama harus segera respon tentang MenpanRB yang baru. Dan kami itu mesti ada PMA baru segera, tapi juga sampai hari ini belum. Kami empat, sekitar 2040 pengawas PAI se-Indonesia resah dengan yang sekarang, Pak.

Mudah-mudahan melalui Komisi X ini juga, tidak saja guru PAI, tapi pengawas PAI harus bagaimana solusinya. Kami ingin, sesungguhnya, kalau regulasi itu kalau PAI karena oleh dua Kementerian, berarti SK-nya harus SK bersama, khusus. Kalau mapel yang lain kan umum.

Karena begini Pak, contoh kemarin, kenapa PAI tidak masuk P3K, nol? Karena Mas Nadiem juga *nggak* tahu, itu urusannya Menteri Agama katanya. Ternyata ini otonomi daerah, *nggak* mungkin Menteri Agama mengangkat untuk di sekolah. Akhirnya, kami ke Komisi X, *alhamdulillah* terima kasih. Kemudian, diakomodir, yang tadinya nol menjadi 13.300 dan sekarang tiap tahun *alhamdulillah*, terima kasih Komisi X.

Jadi, itu saja Pak keresahan kami para pengawas PAI, sedang galau sekitar 2040 pengawas PAI yang bingung karena regulasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Baik, makasih.

Dan sebenarnya sudah banyak kemajuan Pak, dengan kita beberapa diskusi, baik info non formal dan formal dengan para.

UNDANGAN RAPAT:

Izin pimpinan, satu lagi.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ada lagi?

UNDANGAN RAPAT:

Iya.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Di luar konteks, ya.

UNDANGAN RAPAT:

Iya, betul.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Jangan diulang-ulang.

UNDANGAN RAPAT:

Betul.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya.

UNDANGAN RAPAT:

Oke. Izin menambahkan.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Izin, Pimpinan.

Tadi kan menanyakan data terkait P2G, kebetulan data kita sudah terhimpun, ada di 16 kota Garut, Kuningan, Bandung, Ciamis, Bogor, Bekasi, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Pangandaran, Sumedang, Subang, Tasikmalaya, Karawang, Banjar dan Jakarta.

Lalu selanjutnya, saya juga ingin menjelaskan permasalahan honorer yang ada di Jakarta, karena kebetulan saya guru di Jakarta. Jadi, Jakarta itu ada dua honorer yang pertama, honor daerah. Kalau di daerah namanya, kalau di Jakarta namanya KKI (Kontrak Kerja Individu) yang gajinya itu dari APBD dan UMR. Lalu yang selanjutnya, ada honor sekolah yang gajinya itu dari sekolah, dari BOS.

Tetapi, kemudian yang jadi menjadi keresahan teman-teman guru honorer adalah, kalau tadi di Jawa Barat menjelaskan bahwasanya katanya tidak boleh meng-*cut* guru honor sekolah, kalau di Jakarta justru terbalik, kata Pak Iman ada PHK, PHK massal. Teman saya ada beberapa yang sudah mengalaminya.

Artinya, dia hari ini, ajaran baru ini tidak tidak mengajar lagi di sekolah tersebut, karena karena di PHK, seperti itu. Jadi lucunya, guru di PHK, tetapi ketika dia minta surat ke dinas, dinasnya tidak memberikan surat tersebut, malah menyuruh menyuruh orang tersebut untuk menanyakan ke kepala sekolahnya, seperti itu. Dia itu tergeser oleh P3K yang datang ke sekolahnya, kemudian dia tidak ada jam mengajar, lalu digantikan oleh P3K tersebut. Itu.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Walaikumsalam.

Ya, saya rasa sudah merangkum semua. Kalau di satu persatu ini nanti kita jadi Rakernas Guru Honorer gitu. Jadi, kan kita cukup dari perwakilan-perwakilan saja yang telah menyampaikan dan tadi tambahan-tambahan.

Terima kasih, sekali lagi. Nanti kalau masih ada yang menyangkut, belum tersampaikan, nanti kita bisa diskusi, bisa menyampaikan lewat, baik itu Sekretariat Komisi maupun nanti juga bisa lewat Bapak dan Ibu yang berkenan, nanti saling tukar-menukar HP. Kalau saya sih udah banyak kan beredar, nama saya kan.

Jadi, itu saja dan beberapa hal yang telah catatan. Jadi, di antaranya, tadi disampaikan oleh Pak Nur juga pengantar dan kami sudah masukkan sebagai kesimpulan rapat. Yang paling penting adalah bahan paparan dan masukan yang terdiri dari informasi dan rekomendasi yang telah disampaikan para narasumber, maksudnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU dan substansinya akan menjadi rujukan dalam kajian Panja, Pak. Jadi, Panja Pembiayaan Pendidikan. Karena, ada tadi menarik, substansi sebenarnya bisa menjadi substansi bahan Panja Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan.

Bahkan nanti kita bawa juga. Bahkan mungkin salah satunya, walaupun hanya bagian kecil, saya juga bawa Panja, di Panja pembahasan tentang rencana jangka panjang nasional, ya. Artinya apa? Mau diapain ini guru selanjutnya? Guru 2045 bentuknya kayak apa? *Nah* termasuk, jadi bukan PAI aja dan nanti guru dari berbagai agama mau di apa, seperti apa guru agama tahun 2045? Itu yang juga nanti kita klarifikasi.

Kebetulan, Deputi SDM-nya juga dari salah satu, mantan Direktur Pendis di Kementerian Agama, Pak Amih, kan gitu. Dan seyogyanya dari teman-teman Garut bisa berkomunikasi secara lebih akrab dengan Kemenag, ini. Karena, Sekjen Kemenag orang Garut. Tapi tapi ngobrolnya sama Pak Ferdi Komisi X. Jadi, itu saja. Itu yang pertama.

Yang kedua kesimpulannya, jadi terhadap pandangan itu maka yang jadi masalah, kita menyadari ada ada tiga, sebenarnya, sudah disiapin. Ada, bukan tiga, ada empat, empat catatan yang garis besar.

Yang pertama, ada kebijakan yang sifatnya tataran kebijakan. Kebijakan yang strategis, taktis, dan operasional. Menyangkut apa? Di pusat tidak ada masalah, tapi di kabupaten kota, masalah. Kan gitu kan? Di di pusat *nggak* ada masalah, di provinsi mungkin masalah. *Nah*, itu gambarannya.

Yang kedua atau yang ketiga, soal penempatan sertifikasi dan tunjangan serta SK. Ada yang sudah, itu sebenarnya masalah klasik dari dulu, kan? Udah ada lolos *passing grade*, belum dapat SK. Dapat SK, belum dapat penempatan.

Sudah dapat penempatan, belum gaji. Jadi, runtutannya gitu. Kok ketawa sih? *Nah*, itu yang memang menjadi kesimpulan kita juga.

Nah, untuk PAI. *Nah*, kalau menurut kami dan sudah terbukti sebenarnya kalau dari anggaran, Kemendikbud bisa meng-cover walaupun tidak bisa total. *Nah*, pandangannya, masalahnya juga pandang dari teman-teman PAI dan sebenarnya bukan PAI aja ya, guru-guru agama, bisa *nggak* kita harus juga sama-sama berjuang merubah pola pikir bahwa yang diatur ini bukan konteks agamanya, tapi pendidikannya?

Kalau substansi agamanya Meneg, Kementerian Agama. Kalau pendidikannya ya, seandai pun mau dibelah duren, mau dibelah dua, harusnya pendidikannya jadi kompetensinya, jadi kemudian rekrutmennya, kemudian uji sertinya, kemudian pembayaran itu bisa di Kemedikbud. Tapi substansi agamanya, oke dari Kemen Kemenag. Itu, ya. Itu yang yang kita.

Nah yang kedua eh kaitan dengan PAI, substansinya juga adalah perlakuan kan. Yang kita tekankan adalah perlakuan supaya ada *equal* perlakuan atau kesamaan perlakuan antara pendidik yang ada di pendidikan umum, ini sebenarnya pendidikan umum juga, cuma pendidik yang memang ada substansi unsur agama. Kan perlakuan, jadi yang perlu. Tolong dicatat, ya.

Yang ketiga, pengawas. *Nah*, ini masalah pengawas problemnya kalau guru SD, pusing juga nih Pak, ya kan? Kalau guru SMP, mungkin *nggak* pusing karena sudah Matpel, kan? *Nah*, SD problemnya, kalau bicara di luar MA, MI kan 147.868. Berarti kan kalau dibagi rata-rata Pak, berarti kan kalau satu pengawas siap dengan 20, tinggal ngitung aja berapa kebutuhan pengawas. *Nah*, itu kan juga bagian yang harus kita kita diskusikan lebih lanjut.

Sehingga, kekhawatiran Bapak bahwa itu pendekatannya itu, sebenarnya bisa terselesaikan, artinya apa? *Nggak* kaku. Walaupun dia pengawas SMP, karena masih ada kelebihan tenaga juga harus bisa menjadi pengawas sekolah, jadi merangkap. Tidak hanya pengawas sekolah dalam konteks SD, tapi juga pengawas PAI Matpel.

Cuma agak panjang nih Pak, agak panjang kalau ini, perjuangannya. Karena pemahamannya akan, membelahnya juga tidak gampang. Kalau saya sih nangkap, cuma kan *nggak* mungkin saya Ferdiansyah jadi Menteri Agama, kan gitu. Karena kita baru "belaga ulama" Pak ya, belum jadi ulama kan gitu.

Jadi, itu Pak dan kami sudah menyampaikan beberapa poin, jadi jangan khawatir, sudah kita kita catat. Dan apa yang dan yang, aspirasi yang Bapak sampaikan, yang ini bahan *nggak* ada yang terlewat, ya? Saya mau konfirmasi.

Jadi, dari guru honorer seleksi P3K, ini bahannya, ya? Menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Forum Guru Prioritas P3, ini bahannya? Ya. Kemudian, FGHNLPIS, ini bahannya?

Ya. Kemudian, ini satu lagi ini Asosiasi Guru PAI, bahannya ini, ya? Artinya, ini bagian yang tidak terpisahkan sebagai kami nanti dasar menyampaikan, karena sudah diperintah Bapak dan Ibu, akan menyampaikan di rapat. Loh kan perintah? Rakyat memerintahkan kepada wakil-wakilnya, kan? Untuk berjuang dan menyampaikan.

Tapi sebagai juga kita manusia biasa yang punya kekurangan, ada yang bisa cepat, ya kan? Ada yang bisa lambat, ada yang lambat sekali, kan macam-macam lah. Kami juga mohon bantuan untuk selalu dikawal dan diingatkan. Karena, tidak ada orang yang sempurna. Karena, kesempurnaan itu adalah "Milik-Ku", katanya gitu kan. Bukan "milik kita", tapi "Milik-Ku", K nya besar.

Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila penyajian ataupun penerimaan kami ada kurang berkenan.

Mohon maaf. Katanya makin ikan, Bapak-Ibu semoga perjalanan ke tempat tujuannya nanti dengan selamat dan selalu diberikan.

F-NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Tambah.

F-NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Oh, iya.

F-NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Saya lupa tadi menyebutkan. Ini ada saudara saya dari Lampung Utara. Karena saya aslinya Lampung Utara, Kota Bumi. Tadi saya lupa. Ini salam ini semua ya, semangat semua, ya.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Lampung Utara ya. Ya, dipinang sama orang Padang, jadi orangnya jadi jadi orang Padang.

Baik. Ya, nanti kita, tapi yang kami mohon juga bantuannya tadi pemetaan itu bagus sekali. Kalau syukur-syukur sudah ada paling *nggak* membantu kita untuk apa? Mendeteksi penyakit-penyakit itu, kan gitu.

Kiranya, sekali lagi mohon maaf dan atas diskusi yang tidak terasa dua hampir 3 jam. Tepatnya 2 jam 57 menit kita berdiskusi untuk.

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA KCD XII (SUDARMONO, S.Pd.):

Mohon izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya.

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA KCD XII (SUDARMONO, S.Pd.):

Kami jika diizinkan untuk memberikan doa kepada para pejuang Komisi X untuk perjuangan ini. Ya?

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M./KOMISI X DPR RI):

Ya, nanti. Bukan, kami tadi sadar.

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA KCD XII (SUDARMONO, S.Pd.):

Baik. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Dan paham betul kita mau tutup, tapi sebelum ditutup atau kita tutup, kita berdoa, *nah*. Supaya dilancarkan semua urusan kita, dimudahkan urusan kita, dan yang paling penting, ah ini dia, jangan sampai meninggalkan sisa banyak utang, kan ya? Utang pasti ada, *nggak* mungkin *nggak* ada. Utang ke manusia aja banyak, gimana hutang kepada Maha kuasa, kan gitu.

Baik, kalau gitu saya tutup dulu. Nanti kita tutup dengan doa.

Terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Silakan Pak, doa. Saya kasih izin, tapi Bapak ngomong izin juga. Izin menggunakan ajaran agama Islam. Takut yang non muslim.

FORUM GURU PRIORITAS PERTAMA KCD XII (SUDARMONO, S.Pd.):

Baik, Pak.

Terima kasih, pada semua yang hadir.

Dengan mengharap rida dan rahmat dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, kita mohon mudah-mudahan perjuangan kita diridai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. *Wabil khusus*, para pejuang pendidikan di Komisi X ini mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan ke-*istiqamah*-an dan *insyaallah* apa yang kita perjuangkan mendapatkan hasil yang maksimal. Alfatihah.

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil'alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyakana'budu wa iyyakanasta'in ihdinassiratal mustaqim siratallazina an'ama'alahim ghairil maghdubi'alahim waladdooliin.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FERDIANSYAH, S.E., M.M./KOMISI X DPR RI):

Walaikumsalam.

Ya, kita akhiri. Kalau mau foto-foto bersama, silakan. Kalau ada yang mau foto, kalau *nggak* mau foto kita.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.41 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

**DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003**